

**ANALISIS KESEIMBANGAN PRIMER DI INDONESIA  
PERIODE 1977-2014**

**Skripsi**

**Oleh**

**DEWI RIZKIANA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF PRIMARY BALANCE IN INDONESIA PERIOD 1977-2014**

**By**

**DEWI RIZKIANA**

The main purpose of this research was to know the condition of primary balance in Indonesia and to analyze the effect of interest payment and repayment of government debt, inflation, exchange rate, price of world oil and Gross Domestic Product (GDP) on the primary balance in Indonesia. The data used are covering the period 1977-2014 sourced from Indonesian Financial Statistic issued by Bank Indonesia, Central Government Debt Issued by Directorate General of Debt Management, Ministry of finance, World Bank, Statistic Indonesia and U.S. Energi Information Administration. This research used liquidity ratio measurement approach to measure the primary balance and Error Correction Model (ECM) approach to estimate the effect of interest payment and repayment of government debt, inflation, exchange rate, price of world oil and Gross Domestic Product (GDP) on the primary balance in Indonesia. Based on the result of liquidity ratio measurement, it shows that primary balance has been fulfilled to Indonesian budget. It relates with ration trend about 0-1%, so it can be concluded that the continuance of primary balance is in stable condition, but it trend to decrease. Besides, interest payment and repayment of government debt un-constantly influence toward primary balance. That relationship shows the interest have payment and installment payable in negative way and increase, while the acceleration is more decrease toward the primary balance. Then, exchange rate, the price of world oil, and Gross Domestic Product (GDP) teorifically have significant influence toward primary balance, the other than inflation, teorifically and statistically do not have significant influence toward primary balance.

**Keywords:** primary balance, the liquidity ratio of the primary balance, interest payments and repayments of government debt, cointegration, *error correction model* (ECM).

## ABSTRAK

### ANALISIS KESEIMBANGAN PRIMER DI INDONESIA PERIODE 1977-2014

Oleh

DEWI RIZKIANA

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keseimbangan primer di Indonesia dan menganalisis hubungan pembayaran bunga dan cicilan utang pemerintah, inflasi, harga minyak dunia dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap keseimbangan primer di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder time series yang diperoleh dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang diterbitkan Bank Indonesia, World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Energi Amerika Serikat (U.S. *Energi Information Administration*), dengan rentang waktu tahun 1977-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengukuran rasio likuiditas untuk mengukur keseimbangan primer dan pendekatan *Error Correction Model* (ECM) untuk estimasi hubungan pembayaran bunga dan cicilan utang pemerintah, inflasi, harga minyak dunia dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap keseimbangan primer. Berdasarkan hasil perhitungan rasio likuiditas menunjukkan bahwa keseimbangan primer telah mampu mencukupi ketahanan anggaran Indonesia, hal tersebut berkaitan dengan tren rasio yang masih berkisar 0-1% sehingga dapat disimpulkan keberlanjutan keseimbangan primer dalam keadaan stabil namun masih dalam kecenderungan yang menurun. Selain itu, pembayaran bunga dan cicilan utang pemerintah berpengaruh terhadap keseimbangan primer secara tidak konstan (non-linear). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran bunga dan cicilan utang secara negatif dan kemudian meningkat namun dengan percepatan yang semakin menurun terhadap keseimbangan primer. Disamping itu, nilai tukar, harga minyak dunia, dan Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan secara teori terhadap keseimbangan primer namun, inflasi tidak signifikan secara teori maupun statistik terhadap keseimbangan primer.

Kata Kunci: Keseimbangan primer, rasio likuiditas keseimbangan primer, pembayaran bunga dan cicilan utang pemerintah, kointegrasi, *Error Correction Model* (ECM).

**ANALISIS KESEIMBANGAN PRIMER DI INDONESIA  
PERIODE 1977-2014**

**Oleh**

**DEWI RIZKIANA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada**

**Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS KESEIMBANGAN PRIMER  
DI INDONESIA PERIODE 1977-2014**

Nama Mahasiswa : **Dewi Rizkiana**

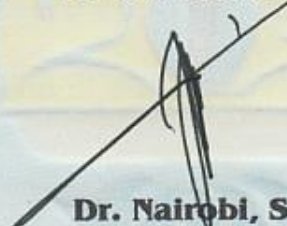
Nomor Pokok Mahasiswa : 1211021036

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

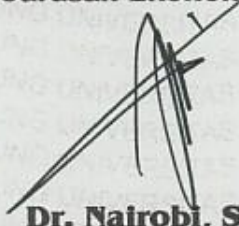
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP 19660621 199003 1 003

**2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

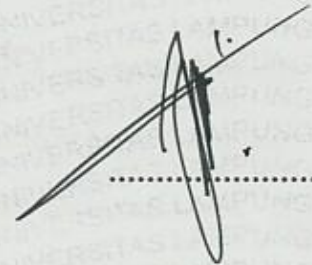


**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP 19660621 199003 1 003

**MENGESAHKAN**

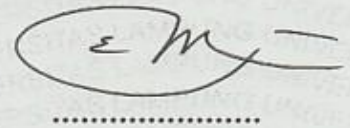
**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**



.....

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**



.....

**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2016**

## PERYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Bandar Lampung, 28 Juni 2016

Penulis



**Dewi Rizkiana**



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Desa Banyuwangi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 5 Juli 1994, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Mardianto Rasam dan Ibu Solami.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiah Bustanul Atfal Muhammadiyah Banyuwangi tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Muhammadiyah Banyuwangi, pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Muhammadiyah Banyuwangi pada tahun 2009, dan Sekolah Madrasah Aliah Negeri (MAN) di MAN 2 Tanjung Karang pada tahun 2012.

Tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Beasiswa PMPAP. Selama menjadi mahasiswi penulis pernah menjadi Ketua Devisi Penelitian dan Pengembangan organisasi *Economic Bussiness and Entrepeneur Club* (EBEC) Fakultas Ekonomi dan Penulis juga aktif di Organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2015 selama 40 hari di Desa Paduan Rajawali, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang.



## MOTTO

*Berlomba-lomba dalam kebaikan.  
(fastabiqul khoirot)  
(Al-Baqarah: 148)*

*Mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar.  
(Amar Ma'ruf Nahi Mungkar)  
(Al-Imran: 110)*

*Janganlah kamu marah, maka pahala bagimu adalah surga  
(HR. Bukhari-Muslim)*

*Hidupnya seorang muslim, adalah ketika dia dapat hadir dan bermanfaat untuk  
orang lain.  
(Dewi Rizkiana)*

*Sedikit Bicara Banyak Bekerja.  
(Dewi Rizkiana)*

*Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau  
jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa  
sakit.  
(Ali Bin Abi Thalib)*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahillahirabbil' alamin, kupersembahkan karya ini kepada Kedua orang tuaku tercinta yang luar biasa besar jasanya bagi hidupku, tanpa kasih sayang, do'a dan perjuangan kalian aku mungkin tidak dapat menjadi seperti saat ini.*

*Terima kasih Bapak dan Ibu yang selalu mendidik dan memperjuangkanku, di setiap waktu dalam sujudmu kau selalu menyebut namaku. Bapak dan Ibu terkasih dan tersayang terima kasih banyak atas segala pemberianmu yang tanpa pamrih ini. Untuk kakak & adikku tersayang terima kasih atas segala dukungan, baik inspirasi, motivasi, untuk kehidupanku.*

*Sahabat- sahabatku yang selalu memotivasi dan memberi kenangan terindah dalam hidupku dan terima kasih BidikMisi berkat program beasiswa ini aku bisa menyelesaikan studi di almamater kebanggaanku Universitas Lampung.*

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul *“Analisis Keseimbangan Primer di Indonesia Periode 1977-2014”* adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan, keteladanan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluargaku tercinta, Ibu merupakan sosok luar biasa yang sangat memotivasi hidupku, Bapak engkaulah pejuang sejati yang tanpa lelah berjuang untuk keluarganya. Kakak ku tersayang Suci Rahayu dan Adik ku terkasih Satrio Akbar Rasyid selalu mendukung tiap langkahku serta seluruh keluarga besarku yang jauh maupun dekat untuk semua kasih sayang dan doanya.

2. Sahabat – sahabatku tercinta yang selalu menginspirasi dan mendorong ke perubahan positif Agus Maryatul K, Sunarti, Putri Puspita Sari, Puspa Ayu, Siti Romsiah, Arifah Hikmawati, Annisa Raudathul Jannah, Mahfudhoh Nur K, Pita Normalia dan Marlia. Terima kasih atas kebersamaan dalam canda maupun dukanya, semoga kita dipertemukan di surganya kelak. Aamiin.
3. Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pelajaran, motivasi dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis.
7. Ibu Dr Marselina, S.E., M.P.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat untuk penulis.
8. Bapak MA. Irsan Dalimunthe, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, nasehat, bimbingan untuk perkembangan kualitas studi penulis.
9. Para Dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah mengajarkanku dengan penuh cinta Pak Nairobi, Pak Toto, Bu Marselina, Pak Muhiddin Sirat, Pak Wayan, Pak Yoke, Pak Ambya, Pak Husaini, Pak Saimul, Bu Asih, Pak Imam, Bu Emi, Bu Zulfa, Bu Betty, Bu Irma, Bu Lies, Bu Ratih, Bu Ida, Pak

Thomas, Pak Dedi, Pak Heru, Pak Yudha dan semuanya tanpa terkecuali.

10. Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bu Hudaiyah, Bu Yati, Mas Fery, Pak Khasim, Mas Ma'ruf, Mas Rodi, Mba Atun, Mba Diah dan yang tak bisa kusebutkan satu per satu atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
11. Keluarga KKN ku, Ka Dea, Ka Apip, Ka Mario, Ka Gede, Ka Indra, Ka Ramadhan, Ghina, Astri, Zhai, Anggun, Pitri dan Ridho yang selalu ada disaat tangis dan tawa saat melewati masa-masa berkiprah langsung dalam masyarakat. Tetap semangat sobatku, walau kita memiliki mimpi yang berbeda tetapi satu visi yaitu menggapai ridho Illahi.
12. Sahabat-sahabatku yang selalu kurindukan Esty Yuliani, Rizky Faradila, My Dorie Putri A dan Andesni Reza Saputra orang yang selalu aku anggap sebagai pintu gerbang hidayahku.
13. Sahabat-sahabatku seperjuangan dalam gerak dakwah Mba Asma, Defa, Roijah yang telah memberikan semangat dalam gerak dakwah islam.
14. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2012, Devina, Athina, Deo, Nuryani, Richa, Emia, Singgih, Kholifah, Dwi K, Dwi S, Mamet, Habibi, Rini, Mute, Yoka, Khanif, Maulidya, Handicky, Ageng, Ulung, Sony, Benny, Ade, Gery, Anto, Asri, Deri, Ketut, Indra, Decu, Medi, Tomy, Yusmitha, Almira, Sinta, Ria, Agus, Tina, Hanum, Amiza, Rina, Nurul, Mia, Medy, Aprida, Vivi, Paul dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Adik-adik tersayangku Keke, Faizah, Bejo, Elsintha, Adit, Sarah, Dewi, sisca, dan keluarga EBEC semua, semoga kebahagiaan selalu tertuju pada kalian.

Semoga Allah memberikan senantiasa memberikan kasih sayang dan perlindungannya kepada kita semua. Akhir kata, penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi setiap pihak. Semoga segala dukungan, bimbingan serta doa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin...

Bandar Lampung, 28 Juni 2016  
Penulis,

**Dewi Rizkiana**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penulisan .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	11
D. Kerangka Pemikiran .....	11
E. Hipotesis .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teori .....	16
1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) .....	16
1.1. Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).....	16
2. Defisit Anggaran .....	18
2.1. Definisi Defisit Anggaran .....	18
2.2. Prinsip Anggaran Defisit.....	20
2.3. Sebab-Sebab Terjadinya Defisit anggaran Pemerintah .....	21
3. Keseimbangan Primer .....	23
4. Utang Negara .....	33
4.1. Utang Dalam Negeri .....	24
4.2. Utang Luar Negeri .....	25
4.2.1. Komponen-Komponen Dalam Utang Luar Negeri .....	26
4.2.2. Rasio Utang Luar Negeri .....	28
5. Inflasi .....	29
5.1. Definisi Inflasi .....	29
6. Nilai Tukar.....	30
7. Harga Minyak Dunia .....	31

8. Produk Domestik Bruto (PDB) .....	32
9. Hubungan Masing-Masing Variabel Terhadap Keseimbangan Primer	33
9.1. Bunga dan Cicilan Utang Pemerintah .....	33
9.2. Inflasi .....	34
9.3. Nilai Tukar .....	35
9.4. Harga Minyak Dunia .....	36
9.5. Produk Domestik Bruto (PDB) .....	37
10. Hubungan Seluruh Variabel .....	38
B. Tinjauan Empiris .....	39

### III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	45
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	45
C. Jenis dan Sumber Data .....	46
D. Batasan Variabel .....	46
E. Teknik Analisis Data .....	48
F. Identifikasi Variabel .....	49
G. Model Analisis .....	50
H. Metode Analisis .....	52
1. Uji Stasioneritas (Uji Akar Unit) .....	54
2. Uji Kointegrasi (Keseimbangan Jangka Panjang) .....	55
3. Uji Koreksi Kesalahan (ECM) .....	56
4. Uji Asumsi Klasik .....	58
4.1. Uji Multikolinieritas .....	58
4.2. Uji Heteroskedastisitas .....	59
4.3. Uji Autokorelasi .....	60
4.4. Uji Normalitas .....	61
5. Uji Hipotesis .....	62
5.1. Uji t (Uji Parsial) .....	62
5.2. Uji F (Uji Keseluruhan) .....	63

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengujian dan Pembahasan .....	65
1. Uji Stasioneritas Data .....	65
2. Uji Kointegrasi .....	66
3. Hasil Pengujian Regresi .....	67
4. Uji Asumsi Klasik .....	70
4.1. Uji Multikolinieritas .....	71
4.2. Uji Heteroskedastisitas .....	72
4.3. Uji Autokorelasi .....	72
4.4. Uji Normalitas .....	73
5. Pengujian Hipotesis .....	74
5.1. Uji t-Statistik .....	74
5.2. Uji F-Statistik .....	75



6.	Interpretasi Hasil .....	76
6.1.	Pengaruh Bunga dan Cicilan Utang Pemerintah Terhadap Keseimbangan Primer .....	76
6.2.	Pengaruh Inflasi Terhadap Keseimbangan Primer .....	78
6.3.	Pengaruh Nilai Tukar terhadap Keseimbangan Primer .....	79
6.4.	Pengaruh Harga Minyak Dunia Terhadap Keseimbangan Primer Indonesia .....	81
6.5.	Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Keseimbangan Primer .....	84
B.	Implikasi Ekonomi dan Kebijakan .....	85
1.	Bunga dan Cicilan Utang Pemerintah .....	85
2.	Inflasi .....	88
3.	Nilai Tukar .....	90
4.	Harga Minyak Dunia .....	92
5.	Produk Domestik Bruto (PDB) .....	93
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Simpulan .....	96
B.	Saran .....	99
1.	Bagi Pemerintah .....	99
2.	Bagi Peneliti Selanjutnya .....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Ringkasan Realisasi APBN 2011-2014 .....	5
2. Ringkasan Deskripsi Data Input .....	50
3. Hasil Uji Akar Unit .....	65
4. Hasil Uji Kointegrasi.....	67
5. Hasil Regresi ECM .....	68
6. Nilai Koefisien Korelasi Antar Variabel Independen .....	71
7. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	72
8. Hasil Uji Autokorelasi.....	73
9. Hasil Uji t-Statistik.....	74
10. Hasil Uji F-Statistik .....	75

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Perkembangan Keseimbangan Primer 1998 – 2014 .....	3
2. Rasio Likuiditas Keseimbangan Primer 1977-2014.....	6
3. Bagan Analisis Runtun Waktu .....	53

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Penelitian .....	L-1
2. Hasil Uji Stasioneritas Tingkat Level .....	L-2
3. Hasil Uji Stasioneritas Tingkat <i>First Difference</i> .....	L-3
4. Hasil Uji Kointegrasi Dengan Pendekatan Johansen.....	L-4
5. Hasil Estimasi <i>Error Corection Model</i> (ECM).....	L-5
6. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	L-6
7. Perhitungan Excel Rasio Likuiditas Keseimbangan Primer, 1977-2014.....	L-7

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

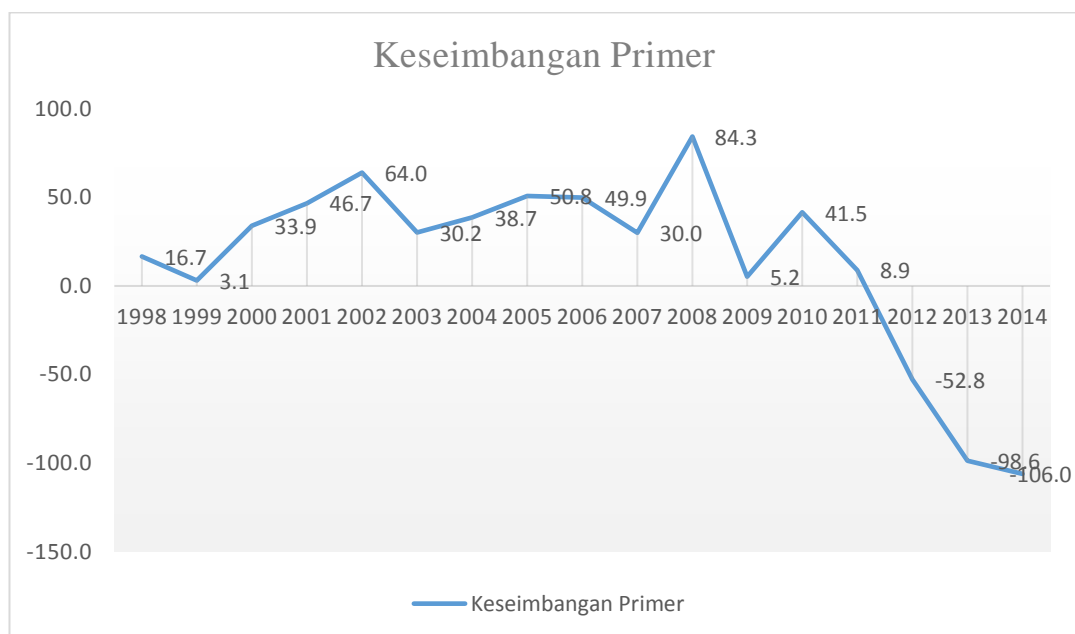
Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Kementerian Keuangan RI, 2010). Kebijakan fiskal merupakan proses penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha (*business cycle*) dan membantu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak (Samuelson, 2001).

Siklus bisnis (*business cycle*) merupakan fenomena ekonomi yang kerap terjadi dalam perekonomian suatu negara. Untuk mengantisipasi fluktuasi yang berlebihan pada siklus bisnis, dikenal ada dua kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Secara sederhana kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan mengubah-ubah anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Manurung, 2009).

Dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. Sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui APBN ini, pemerintah harus menjalankan peran dan fungsi sentral kebijakan fiskal dengan baik agar keadaan APBN berkelanjutan, menjadi sehat dan tidak menimbulkan masalah. Demi mendukung penurunan tingkat defisit, pemerintah selalu berusaha menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD dalam batas yang dapat diatur yaitu di bawah 3% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk membiayai defisit APBN, pemerintah secara bertahap, merubah kebijakan pembiayaan dengan mempertimbangkan sumber-sumber pembiayaan yang berisiko rendah, kemampuan membayar pinjaman, dan kemampuan menyerapnya (Kementerian Keuangan RI, 2010).

Ada tiga tolok ukur yang harus dijaga kondisi kestabilannya dalam mempertahankan kesehatan anggaran suatu negara yaitu yang pertama, penerimaan pajak, kedua yaitu defisit anggaran pemerintah dan yang ketiga, kondisi keseimbangan primer APBN. Kondisi keseimbangan primer Indonesia saat ini mengalami defisit atau benilai negatif, hal ini tidak hanya akan mengurangi kemampuan pemerintah membayar utang tetapi juga akan menambah utang baru. Sampai dengan Juni 2014, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp2.507 trilliun. Apabila keseimbangan primer negatif tidak dapat dikendalikan maka Indonesia berpotensi gagal bayar seperti yang terjadi di Italia dan Yunani (Hidayat, 2014).

Keseimbangan primer merupakan total penerimaan dikurangi belanja dalam APBN yang tidak termasuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang pemerintah. Jika berada dalam kondisi defisit, penerimaan negara tidak bisa menutup pengeluaran sehingga membayar bunga utang dan cicilan pokok sudah menggunakan pokok utang baru. Gambar 1. menunjukkan pergerakan keseimbangan primer APBN Indonesia dari tahun 1998 sampai 2014.



Sumber : Kementerian Keuangan (2014), telah diolah

Gambar 1. Perkembangan Keseimbangan Primer 1998 – 2014

Terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir, Indonesia mengalami defisit pada keseimbangan primernya. Selama pemerintah beralih dalam menggunakan struktur APBN *T-account* menjadi *I-account*, operasi keuangan pemerintah untuk pertama kalinya terjadi defisit keseimbangan primer pada APBN 2012 sejak tahun 1998 hingga 2011 keadaan keseimbangan primer selalu mengalami fluktuasi surplus. Pada tahun 2012 hingga 2014 pergerakan keseimbangan primer masih mengalami defisit sebesar 106,041 triliun rupiah pada tahun 2014 terakhir.

Bank Indonesia dalam laporan perekonomian Indonesia (2012) menjelaskan bahwa defisit keseimbangan primer terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor. Hal ini terjadi karena di faktor utama yaitu pendapatan negara pada tahun 2012 terekam lebih rendah dibandingkan dengan target APBN-P karena tidak optimalnya penyerapan pajak akibat perlambatan ekonomi global yang berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2012. Sedangkan faktor utama lain, pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM yang terus mengalami peningkatan menyebabkan realisasi subsidi jauh melampaui batas anggaran subsidi dalam APBN-P 2012.

Defisit keseimbangan primer APBN berisiko mengganggu kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) karena beban bunga utang harus ditutup dengan penarikan pokok utang baru.

Akibatnya, rasio utang terhadap produk domestik bruto berisiko meningkat. Salah satu pendekatan untuk menilai kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal adalah dengan cara melihat kondisi keseimbangan primer, APBN yang bernilai negatif menunjukkan keberlanjutan fiskal Indonesia terganggu. Hal ini perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Di bawah ini merupakan tabel realisasi APBN yang menunjukkan posisi dari keseimbangan primer dalam APBN dalam empat tahun terakhir sejak 2011 sampai 2014.



Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBN 2011-2014 (Triliun Rupiah)

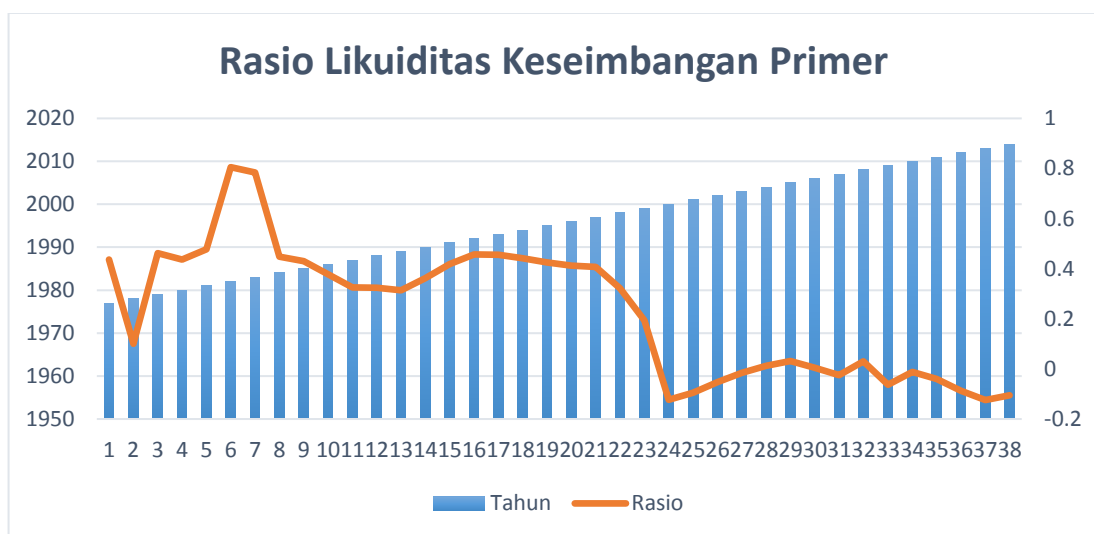
Keterangan	2011	2012	2013	2014
	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>1.210,6</b>	<b>1.338,1</b>	<b>1.438,9</b>	<b>1.635,4</b>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.205,4</b>	<b>1.332,2</b>	<b>1.432,1</b>	<b>1.633,1</b>
1. Penerimaan Perpajakan	873,9	980,5	1.077,3	1.246,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	332,5	351,8	354,8	386,9
<b>II. Hibah</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>6,8</b>	<b>3,3</b>
<b>Belanja Negara</b>	<b>1.295,0</b>	<b>1.491,4</b>	<b>1.650,6</b>	<b>1.876,9</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>883,7</b>	<b>1.010,6</b>	<b>1.137,2</b>	<b>403,0</b>
<b>II. Transfer Ke Daerah</b>	<b>411,3</b>	<b>480,6</b>	<b>513,3</b>	<b>596,5</b>
<b>III. <u>Suspen</u></b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>
<b>Keseimbangan Primer</b>	<b>8,8</b>	<b>(52,8)</b>	<b>(98,6)</b>	<b>(106,0)</b>
<b>Surplus/Defisit Anggaran (<u>A-B</u>) E</b>	<b>(84,4)</b>	<b>(153,3)</b>	<b>(211,7)</b>	<b>(241,5)</b>
<b>Pembiayaan (<u>E.I</u> + <u>E.II</u>)</b>	<b>130,9</b>	<b>175,2</b>	<b>237,4</b>	<b>241,5</b>
I. Pembiayaan Dalam Negeri	102,7	137,0	219,3	253,7
II. Pembiayaan Luar Negeri ( <u>netto</u> )	28,3	38,1	18,1	(12,2)

Sumber: Kementerian Keuangan, telah diolah

Kondisi keseimbangan primer di Indonesia menunjukkan bahwa keseimbangan primer mengalami defisit sejak tahun 2012 hingga APBN-P 2014 pun masih menunjukkan defisit. Sedangkan keseimbangan primer merupakan indikator yang menunjukkan kapasitas fiskal untuk membiayai belanja negara. Ketika posisi keseimbangan primer defisit dan rasio keseimbangan primer terhadap PDB itu pun negatif maka dapat dipastikan bahwa pengeluaran pemerintah akan banyak bergantung kepada utang sehingga utang negara akan mengalami kenaikan signifikan. Ketika kondisi ini terus berlanjut maka kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya defisit di masa yang akan datang dengan bertambahnya pembayaran utang ataupun pengeluaran belanja pemerintah yang

lain. Khususnya pengeluaran pemerintah pada subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan impor BBM. Sedangkan harga minyak dunia terus mengalami peningkatan. Terjadinya kelebihan pembiayaan pemerintah yang cukup besar sejak tahun 2008 dan penerimaan dari sumber pajak yang terus menurun memperparah kondisi defisit APBN ataupun rasio keseimbangan primer.

Rasio keseimbangan primer adalah rasio yang digunakan untuk melihat ketangguhan dari rasio keseimbangan primer. Kemudian dalam pengukurannya menggunakan rasio likuiditas dimana rasio ini mencerminkan indikasi likuiditas. Semakin besar surplus keseimbangan primer, maka akan semakin baik kemampuan untuk membayar defisit (Manurung, 2009).



Sumber: Kementerian Keuangan, telah diolah

Gambar 3. Rasio Likuiditas Keseimbangan Primer, 1977-2014

Rasio likuiditas keseimbangan primer Indonesia dari tahun 1977-1990 masih menunjukkan kondisi yang stabil dan terus meningkat mencapai 0,20 persen. Setelah memasuki tahun 1990-2000 mulai terdapat penurunan pada stabilitas likuiditasnya dimana rasio mengalami kecenderungan yang menurun yang pada

tahun 1997-1998 menjadi 0,11 persen hal tersebut bertepatan dengan terjadinya krisis yang dialami Indonesia. kemudian pemerintah berhasil menstabilkan kembali, meskipun dalam pergerakannya semakin melambat pada periode 2000-2014 kondisi likuiditas keseimbangan primer bergerak positif namun dalam kecenderungan yang masih menurun.

Begitu banyak penyebab yang menimbulkan keseimbangan primer mengalami defisit, maka penelitian mengenai keseimbangan primer sangat menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai defisit APBN telah banyak dilakukan antara lain Harun Rosit (2010) yang meneliti tentang hubungan kausalitas asumsi APBN terhadap APBN di Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa asumsi APBN memberi kontribusi terhadap APBN, tetapi perkiraan varian yang paling memberi kontribusi APBN adalah harga minyak internasional dan nilai tukar.

Studi empiris mengenai analisis dalam mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal APBN 2009 yang dilakukan oleh Departemen Keuangan menghasilkan penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan beberapa asumsi ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, harga dan *lifting* minyak mentah Indonesia) yang secara signifikan berpengaruh terhadap besaran-besaran APBN, baik pada pendapatan negara maupun belanja negara.

Merujuk kembali berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Manurung (2009) yaitu “Analisis Keberadaan Utang Indonesia dan Dampak Defisit Anggaran terhadap Keberlanjutan Fiskal”. Manurung (2009) menggunakan pendekatan likuiditas dan solvabilitas karena ia berpendapat bahwa likuiditas dan

solvabilitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membayar utang beserta bunganya dengan menggunakan uang diluar utang dan obligasi pada saat perekonomian krisis. Rasio utang terhadap PDB kurang akurat dan penggunaan PDB sebagai indikator pendapatan pemerintah yang belum optimal. Pada pendekatan rasio likuiditas keseimbangan primer, hasil penelitian menunjukkan bahwa angka *debt service ratio* (DSR) yang terus meningkat dapat mengindikasikan bahwa fiskal Indonesia berada dalam kondisi *sustainable*. Meskipun tingkat solvabilitas fiskal cenderung memburuk, dalam jangka panjang solvabilitas fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi aman sehingga fiskal Indonesia masih dapat dikatakan berkelanjutan. Sehingga untuk mengoptimalkan kebijakan fiskal Negara Indonesia tingkat pengembalian utang pemerintah sangat penting dalam memperoleh perhatian pemerintah, yang salah satu indikator utamanya adalah keseimbangan primer Indonesia.

Oleh karena itu dalam penelitian ini tertarik menganalisis tentang “Analisis Keseimbangan Primer di Indonesia Periode 1977-2014”. Penelitian ini menganalisis kondisi keseimbangan primer yang terjadi di Indonesia menggunakan analisis teoritis dan di dukung oleh studi-studi empiris yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain. Penelitian ini menggunakan data Indonesia tahun 1977 hingga 2014.

Sedangkan, dalam menganalisis pengaruh bunga dan cicilan hutang pemerintah dan variabel-variabel ekonomi makro lainnya terhadap keseimbangan primer pemerintah digunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM). Keseimbangan primer dalam penelitian ini diukur melalui selisih penerimaan dan

pengeluaran yang dikurangi pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer digunakan agar dapat mengurangi dampak defisit yang lalu dan dapat mengukur ketahanan anggaran pemerintah (Hidayat, 2014).

## **B. Rumusan Masalah**

Defisit keseimbangan primer APBN berisiko mengganggu keberlanjutan fiskal karena beban bunga utang harus ditutup dengan penarikan pokok utang baru. Akibatnya, rasio utang terhadap produk domestik bruto berisiko meningkat. Dengan menggunakan salah satu pendekatan untuk menilai keberlanjutan fiskal, melihat kondisi keseimbangan primer APBN yang bernilai negatif, keberlanjutan fiskal Indonesia akan terganggu. Harusnya meskipun tidak mencapai surplus, menekan defisit APBN akan membuat keseimbangan primer APBN menjadi lebih baik. Jika dilihat secara keseluruhan Indonesia belum bisa mencapai keberlanjutan fiskal secara optimal karena semakin tingginya belanja negara dan ketidakmampuan pihak pemerintah dalam membayar cicilan pokok utang, sehingga menyebabkan kesenjangan anggaran yang terus berlanjut.

Permasalahan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu penting bagi pemerintah untuk mengetahui bagaimana pergerakan fluktuasi keseimbangan primer hingga menyebabkan angka dalam APBN mencapai kondisi defisit. Dengan mengetahui variabel yang berkaitan secara signifikan mempengaruhi keseimbangan primer serta bagaimana pengaruh yang diberikan. Beberapa variabel menunjukkan bahwa ada beberapa data yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori dan beberapa

penelitian terdahulu terhadap defisit APBN. Dengan demikian, maka yang menjadi perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh bunga dan cicilan utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, harga minyak dunia dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap keseimbangan primer pemerintah Indonesia periode 1977-2014?
2. Bagaimana implikasi ekonomi dan kebijakan setiap perlakuan variabel bunga dan cicilan utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, harga minyak dunia, dan Produk Domestik bruto (PDB) yang memiliki pengaruh terhadap keseimbangan primer Indonesia?

### **C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian**

Berkenaan dengan permasalahan kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dan faktor-faktor variabel makro ekonomi yang memengaruhinya yang di hadapkan pada kondisi keseimbangan primer, maka untuk menjawab rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini di harapkan mampu memperoleh tujuan dan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui adakah pengaruh bunga dan cicilan utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, harga minyak dunia dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap keseimbangan primer pemerintah Indonesia periode 1977-2014.

- b. Mengetahui dampak implikasi ekonomi dan kebijakan setiap perlakuan variabel bunga dan cicilan utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, harga minyak dunia, dan Produk Domestik bruto (PDB) yang memiliki pengaruh terhadap keseimbangan primer Indonesia

## **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna terhadap berbagai pihak, seperti :

- a. Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan kesinambungan anggaran.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi faktor pembentukan struktur fiskal dan utang luar negeri terhadap kesinambungan anggaran.
- c. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang dapat diperoleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Secara umum definisi mengenai keberlanjutan fiskal berkaitan dengan keseimbangan primer (*primary balance*) dan kondisi utang suatu negara.

Beberapa ahli mendefinisikan keberlanjutan fiskal dengan melihat hubungan pertumbuhan ekonomi dan stok utang. Menurut Edwards (2002) dalam Santoso (2005), fiskal akan berkesinambungan apabila rasio utang terhadap PDB bersifat

stasioner. Salah satu alat untuk mengukur keberlanjutan fiskal adalah nilai keseimbangan primer (*primary balance*) dalam APBN.

Menurut Thomas J. Sargent (2011) menyatakan utang pada dasarnya tidak perlu dipersoalkan, sepanjang dapat menghasilkan pendapatan (*revenues*) yang cukup untuk membayar kembali utang tersebut. Dan salah satu alat untuk mengukur kesinambungan fiskal adalah melihat nilai keseimbangan primer (*primary balance*) dalam APBN (Sunarsih, 2009). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang pemerintah sedangkan keseimbangan umum ialah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

Sepatutnya keadaan keseimbangan primer ini berada pada posisi primer positif yang berarti posisi tersebut menunjukkan utang akan berkurang seiring dengan waktu. Tetapi sebaliknya posisi keseimbangan primer di Indonesia atau pun negara berkembang lainnya menunjukkan posisi primer negatif yang dalam jangka panjang akan membahayakan perekonomian sebab meningkatnya nilai utang secara signifikan (Djamester, 2007).

Indonesia pertama kali mengalami defisit pada saldo keseimbangan primer dari tahun 2012 dan makin merosot hingga sekarang. Neraca keseimbangan primer yang defisit ini menandakan bunga dan pokok utang dibayar dengan menggunakan utang baru. Pembayaran bunga dan cicilan utang tidak bisa lagi dibiayai oleh penerimaan negara, namun menggunakan pinjaman baru. Karena penerimaan negara yang semakin menurun melalui penerimaan perpajakan. Jika dikaitkan dengan teori Sargent, kemampuan utang Indonesia dalam menghasilkan



pendapatan (*revenue*) untuk dipergunakan pemerintah membayar kembali bunga dan pokok utangnya kini semakin menurun.

Selain itu, juga terjadi defisit neraca pembayaran, yang menekan posisi cadangan devisa dan nilai kurs rupiah. Diantaranya karena lemahnya ekspor dan membanjirnya impor serta rasio pembayaran utang luar negeri Indonesia terhadap penerimaan transaksi berjalan yang mengalami kenaikan tajam mencapai 39,1% di akhir tahun 2013. Sehingga, secara tidak langsung, posisi APBN dan utang pemerintah juga ikut memperlemah nilai tukar Rupiah dan neraca transaksi berjalan akan mengalami defisit. Tidak hanya itu kondisi ini pun disebabkan karena pengeluaran pemerintah yang begitu besar pada subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan impor BBM. Sedangkan harga minyak dunia terus mengalami peningkatan dengan nilai tukar Rupiah yang semakin melemah dan suku bunga internasional yang tinggi (Kementerian Keuangan RI, 2013).

Terjeratnya Indonesia dalam situasi krisis hutang seperti ini akan menimbulkan kekacauan ekonomi dalam stimulus fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Ketahanan fiskal pun akan semakin berkurang, kondisi ini akan menyebabkan tekanan terhadap utang pemerintah menjadi meningkat dan tingginya pembayaran utang pemerintah beserta beban bunganya membawa implikasi bagi perekonomian. Akibatnya, rasio utang luar negeri terhadap neraca berjalan beresiko akan meningkat.

Keseimbangan primer berkaitan erat dengan defisit APBN. Jika dilihat secara keseluruhan Indonesia belum bisa mencapai kesinambungan fiskal secara optimal karena semakin tingginya belanja negara dan ketidak mampuan pihak pemerintah dalam membayar cicilan pokok utang, sehingga menyebabkan kesenjangan anggaran yang terus berlanjut. Dan diperlukan adanya analisis sebab terjadinya defisit keseimbangan primer dalam dua tahun terakhir ini dan pengaruhnya terhadap ketahanan fiskal Indonesia.

### **E. Hipotesis**

Dari uraian di atas maka dapat diambil beberapa hipotesis yaitu :

1. Diduga bunga dan cicilan utang pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer Indonesia.
2. Diduga inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer Indonesia.
3. Diduga nilai tukar berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer Indonesia.
4. Diduga harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer Indonesia.
5. Diduga Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer Indonesia
6. Diduga secara bersama-sama variabel bunga dan cicilan utang pemerintah, inflasi, nilai tukar dan harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap keseimbangan primer Indonesia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang akan diuraikan sesuai dengan kaidah penulisan dan disusun dengan sistematika tulisan sebagai berikut :

- I           Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.
- II           Tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini yang diperoleh dari literatur dan sumber lainnya.
- III          Metodologi penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian ini dilakukan terdiri dari jenis penelitian, deskripsi dan pemilihan data, sumber dan teknik pemilihan data, definisi variabel yang diteliti, model analisis data, pengujian model, uji stasioneritas, uji kointegrasi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
- IV          Pembahasan, analisis hasil dari pengujian statistik yang telah digunakan.
- V           Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Teori**

#### **1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)**

##### **1.1. Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Suparmoko (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggaran ialah suatu alat perencanaan tentang penerimaan dan pengeluaran di masa yang akan datang umumnya disusun dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Kementerian Keuangan (2004), Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrument untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas

pembangunan secara umum. Dalam menyusun APBN, perencanaan alokasi belanja negara diarahkan untuk mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif, yaitu terjadinya realokasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi khususnya dalam stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas belanja negara dengan mengutamakan belanja modal sebagai pendukung pendanaan bagi kegiatan pembangunan, mengefisienkan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, dan menghindari peningkatan pengeluaran wajib. Belanja modal difokuskan untuk mendukung program infrastruktur, mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat, infrastruktur pertanian, dan infrastruktur energi serta komunikasi (Lestari, 2011).

Sebelum tahun 1999 prinsip APBN adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara, dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari *T-Account* menjadi *I-Account*. Perbedaan antara prinsip anggaran surplus/defisit dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa : 1) Pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan, dan 2) Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah sumber pembiayaan luar negeri bersih. Apabila belanja lebih kecil daripada anggaran, disebut sebagai anggaran surplus. Sebaliknya, apabila anggaran lebih kecil

daripada pengeluaran atau pengeluaran lebih besar daripada anggaran, disebut anggaran defisit. Masing-masing kebijakan anggaran mempunyai kecenderungan tersendiri. Pada sistem anggaran berimbang misalnya, perekonomian cenderung berjalan stabil jika dibandingkan dengan kebijakan anggaran defisit dan surplus.

APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan dan sebaliknya. Kebijakan APBN diharapkan dapat merespon dinamika rakyat, baik yang terkait dengan perkembangan perekonomian secara luas, maupun perkembangan kehidupan rakyat itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang fleksibel (Lestari, 2011).

Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak tahun anggaran 2000, Indonesia telah mengubah komposisi APBN dari *T-account* menjadi *I-account* sesuai standar statistik keuangan pemerintah, *Government Finance Statistics (GFS)*.

## **2. Defisit Anggaran**

### **2.1. Definisi Defisit Anggaran**

Menurut Manurung (2009) defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( $G > T$ ). Anggaran yang defisit ini biasanya

ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Definisi dari defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus adalah suatu anggaran dimana terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak. Sedangkan menurut Dornbusch, Fischer dan Startz defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Dornbusch, Fischer, dan Startz mengatakan bahwa Pemerintah secara keseluruhan, terdiri dari Departemen Keuangan bersama Bank Sentral dapat membiayai defisit anggarannya dengan dua cara yaitu dengan menjual obligasi maupun "mencetak uang". Bank Sentral dikatakan "mencetak uang" ketika Bank Sentral meningkatkan stok uang primer, umumnya melalui pembelian pasar terbuka dengan membeli sebagian utang yang dijual Departemen Keuangan (Efendi, 2009).

Ada dua kemungkinan jenis hubungan yang terjadi antara defisit anggaran dengan pertumbuhan uang. Pertama, dalam jangka pendek kenaikan defisit yang disebabkan karena kebijakan ekspansioner akan cenderung menaikkan suku bunga nominal dan riil. Jika Bank Sentral menjaga supaya suku bunga tidak naik, maka dilakukan tindakan dengan meningkatkan pertumbuhan uang. Kedua, pemerintah dengan sengaja menaikkan persediaan uang dengan maksud agar mendapat penerimaan pemerintah dalam jangka panjang (Efendi, 2009).

Terdapat beberapa definisi defisit, secara konvensional defisit dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Sementara itu, pengertian kedua adalah defisit moneter. Defisit moneter adalah selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan

total pendapatan (di luar penerimaan hutang). Pengertian ketiga adalah defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal. Definisi yang terakhir adalah defisit primer. Defisit primer merupakan selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan. Selain itu, masih terdapat beberapa definisi dari defisit dan sangat tergantung pada kriteria yang digunakan serta tujuan analisis. Biasanya pilihan konsep defisit yang tepat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain yaitu jenis ketidakseimbangan yang terjadi, cakupan pemerintah (pemerintah pusat, konsolidasi pemerintah, dan sektor publik), metode akuntansi (*cash dan accrual basis*), dan status dari *contingent liabilities* (Simanjuntak dalam Endah, 2010).

## 2.2. Prinsip Anggaran Defisit

Pada anggaran defisit ditentukan:

- (1) Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber pembiayaan.
- (2) Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih).

Anggaran Defisit

$$\text{PNH} - \text{BN} = \text{DA}$$

$$\text{DA} = \text{PbDN} + \text{PbLN}$$

$$\text{PbDN} = \text{PkDN} + \text{Non} - \text{Pk DN}$$

$$\text{PbLN} = \text{PPLN} - \text{PC PULN}$$

Keterangan:



PNH = Pendapatan negara dan hibah	Non-PkDN = Non-Perbankan DN
BN = Belanja Negara	PbLN = Pembiayaan LN
DA = Defisit Anggaran	PPLN = Penerimaan pinjaman LN
PbDN = Pembiayaan DN	PCPULN = Pembayaran cicilan pokok
PkDN = Perbankan DN	Utang Luar Negeri

### 2.3. Sebab-sebab Terjadinya Defisit Anggaran Pemerintah

Terjadinya suatu defisit pada anggaran pemerintah pasti disebabkan oleh berbagai hal, yaitu sebagai berikut :

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak.
- Rendahnya daya beli masyarakat, masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya. Apabila dibiarkan saja menurut mekanisme pasar, barang-barang itu pasti tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat dan mereka akan tetap terpuruk. Oleh karena itu, negara

memerlukan pengeluaran untuk mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa ikut menikmati.

- Pemerataan pendapatan masyarakat, pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan biaya untuk misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Kegiatan itu misalnya dengan memberi subsidi kepada pelayaran kapal perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencil, sehingga masyarakat mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya yang sesuai dengan kemampuannya.
- Melemahnya nilai tukar, Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri dan mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga meningkat.
- Pengeluaran karena inflasi, penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya

kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi (Efendi, 2009).

Masalah utama kelangsungan APBN adalah masih adanya defisit anggaran.

Persoalannya adalah bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit tersebut masih dapat dicarikan pembiayaannya. Penjelasan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) (Kuncoro, 2011).

### **3. Keseimbangan Primer**

Keseimbangan primer adalah selisih antara anggaran dan pengeluaran pemerintah di luar bunga dan cicilan utang. Definisi lain mengenai keseimbangan primer adalah pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara, namun dari komponen belanja negara tersebut komponen pembayaran bunga hutang dikeluarkan (tidak diperhitungkan). Menurut Santoso (2004) dalam PPE FE UGM, aliran surplus primer merupakan fondasi utama bagi ketahanan fiskal pemerintah terhadap utang. Arah kebijakan fiskal (*fiscal stance*) dikatakan berkesinambungan (*sustainable*) apabila rasio keseimbangan primer terhadap PDB tetap (*finite*).

Keberlanjutan fiskal perlu memperhatikan hubungan antara keseimbangan primer (*primary balance*) dan *outstanding* utang. Hubungan ini mengasumsikan bahwa nilai sekarang (*present value*) dari surplus keseimbangan primer (*surplus primary balance*) pada masa yang akan datang sama dengan *outstanding* utang pada saat tertentu pendekatan nilai sekarang (*present value constraint approach*). Jika *outstanding* utang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka surplus keseimbangan primer (*surplus primary balance*) dari tahun ke tahun juga meningkat dengan tren peningkatan yang sama, atau lebih besar dari peningkatan utang agar periode pelunasan utangnya semakin pendek.

#### **4. Utang Negara**

Sumber-sumber penerimaan pemerintah yang paling utama adalah dari pajak, pinjaman, dan pencetakan uang. Di samping itu ada sumber penerimaan lain yang memainkan peranan penting yaitu utang negara. Utang negara merupakan sumber-sumber dana tambahan pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berupa pinjaman negara. Sumber pendanaan ini digunakan untuk menutupi kekurangan dana yang mampu diciptakan oleh pemerintah (Suparmoko, 2002).

Berdasarkan sumber perolehannya, utang negara dapat dibedakan menjadi menjadi dua yaitu:

##### **4.1. Utang Dalam Negeri**

Utang dalam negeri merupakan pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Utang luar negeri dapat bersifat terpaksa maupun bersifat

sukarela. Badan atau lembaga yang menjadi sumber utang atau pinjaman negara dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1) Individu Dalam Masyarakat

Pemberian pinjaman oleh para individu dengan cara membeli obligasi negara. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pemerintah dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur yang dimiliki.

c. Bank-Bank Umum

Dengan pembelian obligasi negara maka bank umum mempunyai tambahan cadangan penjaminan (*reserve requirement*) 20%. Kondisi ini memungkinkan bank umum untuk menciptakan uang giral sebanyak lima kali lipat dan tidak menurunkan pendapatan nasional.

d. Bank Sentral

Pemerintah dapat menjual obligasi kepada Bank Sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga lebih seperti halnya bila pemerintah menjual obligasi kepada bank umum.

#### **4.2. Utang Luar Negeri**

Utang luar negeri merupakan pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Utang luar negeri biasanya bersifat sukarela,

terkecuali bila ada suatu kekuasaan dari suatu negara atas negara lain. Utang luar negeri adalah pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain, yaitu mencakup pemindahan kekayaan (dana) dari negara yang meminjamkan (kreditur) ke negara peminjam (debitur) pada saat terjadinya pinjaman (Basri dan Subri, 2005). Utang luar negeri yang harus di penuhi oleh pemerintah melalui anggaran rutin setiap tahunnya adalah berupa pembayaran bunga utang beserta cicilan pokok utang. Pemerintah menggunakan utang luar negeri adalah sebagai alat pelengkap dalam memenuhi kekurangan dari sumber dana pembangunan.

#### **4.2.1 Komponen-Komponen dalam Utang Luar Negeri**

Setiap kali pemerintah mendapatkan utang luar negeri, maka pencatatannya dilakukan pada pos pembiayaan APBN, yaitu pada kelompok pos pembiayaan luar negeri. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI, pemerintah akan mengajukan secara resmi penarikan pinjaman dari negara lain ataupun kelompok/konsorsium tertentu untuk mendapatkan pinjaman. Perjanjian utang yang ditandatangani meliputi besarnya bunga utang dan besarnya pembayaran cicilan pokok utang. Keseluruhan penarikan utang luar negeri tersebut dicatat pada APBN, yaitu pada pos penarikan pinjaman luar negeri bruto. Ada dua macam bentuk penarikan utang luar negeri yang dicatat dalam APBN, yaitu pinjaman dalam bentuk program dan pinjaman dalam bentuk proyek (Kusuma,2012).

Bunga utang merupakan beban finansial yang dikenakan kepada pihak peminjam/pengutang sebagai bentuk konsekuensi yang telah disepakati. Pembayaran bunga utang luar negeri dalam APBN dicatat di dalam pos pengeluaran rutin, yaitu pada pos pembayaran bunga utang atau masuk ke dalam pos pembayaran bunga utang luar negeri. Dimasukkannya pembayaran bunga utang luar negeri ke dalam pos pengeluaran rutin dikarenakan untuk menunjukkan besarnya beban anggaran sebagai konsekuensi keputusan pemerintah mengambil utang luar negeri (Kusuma, 2012).

Selain bunga utang luar negeri, pemerintah diharuskan pula membayarkan sejumlah cicilan pokok utang luar negeri. Besarnya pembayaran cicilan tersebut disesuaikan dengan kesepakatan utang antara pemerintah dan pihak yang memberikan utang kepada pemerintah. Dalam hal ini, utang luar negeri yang telah diterima akan dibayarkan secara bertahap hingga masa berakhirnya atau masa jatuh tempo utang luar negeri pemerintah. Karena sifatnya tidak mendesak, maka pencatatannya ditempatkan pada pos pembiayaan APBN, yaitu pada pos pembiayaan luar negeri dan pos pembayaran cicilan pokok utang luar negeri (amortisasi) (Kusuma, 2012).

Pengelolaan utang luar negeri pemerintah dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan RI atau Departemen Keuangan RI. Total utang luar negeri pemerintah tidak dicantumkan dalam APBN, karena APBN hanya mencatat aliran anggaran yang masuk dan keluar. Untuk utang luar negeri dikelola secara khusus pada direktorat jenderal (ditjen) pengelolaan utang negara. Ini berarti pencatatan

mengenai besarnya total utang luar negeri pemerintah Indonesia dapat diketahui melalui situs Departemen Keuangan (Depkeu) atau dapat pula langsung menuju situs Ditjen Pengelolaan Utang Negara. Pencatatan utang luar negeri pemerintah dilakukan pula oleh pihak Bank Indonesia pada pos neraca pembayaran yang dicantumkan dengan istilah posisi utang luar negeri pemerintah. Angka yang dicantumkan dinyatakan ke dalam satuan mata uang Dolar. Dalam hal ini, pihak BI mencatat pula posisi utang luar negeri swasta ke dalam ringkasan neraca pembayaran (Departemen Keuangan RI, 2015).

#### **4.2.2. Rasio Utang Luar Negeri**

Pemerintah selalu menggunakan indikator utang yang disebut rasio utang luar negeri terhadap PDB. Menurut perhitungan rasio tersebut, utang luar negeri pemerintah Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan rasio serupa yang dimiliki Jepang, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Apakah sesungguhnya makna rasio utang luar negeri terhadap PDB dan apakah ada ukuran rasio utang luar negeri lainnya (Kusuma, 2012).

Rasio utang luar negeri terhadap PDB menunjukkan besarnya total utang luar negeri pemerintah terhadap besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Rasio tersebut menggambarkan besarnya kewajiban finansial dari pemerintah terhadap besarnya kapasitas produksi di dalam negeri yang dicatatkan ke dalam PDB. Tidak sedikit kalangan ekonom yang mengkritik penggunaan rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari beban keuangan negara. Aktivitas perekonomian bisa jadi mencerminkan potensi ekonomi bagi pemerintah untuk dapat membayarkan utang



luar negeri. Namun, seberapa besar potensi ekonomi tersebut dapat diserap tergantung dari pengelolaan dan sistem penyerapannya ke dalam anggaran negara.

Indikator utang luar negeri lainnya adalah *debt service ratio* atau disebut DSR, yaitu rasio perbandingan besarnya cicilan pokok utang luar negeri plus bunga utang luar negeri terhadap total cadangan devisa setiap tahunnya. Sebelum tahun 2000, indikator DSR cukup populer diterapkan sebagai kontrol atas kebijakan utang luar negeri di mana implikasi dari kebijakan utang luar negeri akan berakibat beban pada keuangan negara. Masalah yang perlu diperhatikan pada beban keuangan negara berupa bunga utang luar negeri dan cicilan pokok utang luar negeri adalah besarnya cadangan devisa. Pembayaran tersebut tentunya akan menggunakan alat devisa berupa mata uang asing. Besarnya cadangan devisa harus diperhatikan atau dikontrol pemanfaatannya, agar nantinya dapat pula mencukupi keperluan impor atas kebutuhan di dalam negeri. Nilai indikator DSR diberikan batasan sebesar 15% yang dapat ditoleransi di mana di atas 15% dikatakan berada dalam kondisi waspada.

## **5. Inflasi**

### **5.1. Definisi Inflasi**

Menurut Boediono (2001), inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi dan penggolongan mana yang dipilih tergantung pada tujuan kita. Inflasi didefinisikan dengan banyak ragam yang berbeda, tetapi semua definisi itu mencakup pokok-pokok yang sama. Samuelson (2001) memberikan definisi bahwa inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum,

baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Penggolongan pertama didasarkan atas .parah. tidaknya inflasi tersebut, maka macam-macam inflasi, yaitu:

- Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun)
- Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun)
- Hiperinflasi (di atas 100%)

## **6. Nilai Tukar**

Menurut Mankiw (2009) menyebutkan bahwa kurs/nilai tukar (*exchange rate*) antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Perubahan nilai tukar ini menurut Paul Krugman dan Obstfeld (2000) dapat dibedakan menjadi dua yaitu depresiasi dan apresiasi. Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing, sedangkan apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Bila kondisi lain tetap (*ceteris paribus*), maka depresiasi mata uang suatu negara membuat harga barang-barang negara tersebut lebih murah bagi pihak luar negeri sedangkan harga barang luar negeri menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri. Dan sebaliknya, apresiasi mata uang suatu negara menyebabkan harga barang negara tersebut menjadi mahal bagi pihak luar negeri sedangkan harga barang luar negeri menjadi lebih murah bagi pihak dalam negeri.

## 7. Harga Minyak Dunia

Jumlah penawaran (*quantity supplied*) dari suatu barang adalah jumlah yang rela dan mampu dijual oleh penjual atau produsen. Banyak hal yang mempengaruhi jumlah penawaran barang, tapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, salah satu penentu adalah harga dari barang itu sendiri. Karena jumlah penawaran akan meningkat dan menurun seiring naik dan turunnya harga. Dapat dikatakan bahwa jumlah penawaran berhubungan positif terhadap harga (Mankiw, 2009).

Demikian juga dengan harga minyak dunia, banyak faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan harga minyak. Saat ini, dunia didominasi politik negara-negara besar dan perusahaan minyak tingkat dunia. Pada kondisi tertentu, kedua faktor ini sangat mempengaruhi harga pasar. Perubahan harga minyak di pasar dunia, baik kenaikan maupun penurunan, dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, mengingat minyak merupakan salah satu kebutuhan pokok suatu negara, terutama menjadi salah satu bahan baku dalam kegiatan produksi. Fluktuasi harga minyak ini harus senantiasa dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan, karena harga ini dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara, terutama kebijakan dalam bidang ekonomi dan energi (Rosit, 2010).

Naiknya harga minyak dunia akan memberikan dampak kenaikan pada harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia terpaksa mengambil keputusan yaitu menaikkan harga BBM.

Rendahnya harga BBM disaat harga minyak dunia sedang naik, merupakan salah satu sumber defisit APBN. Oleh karena itu, ada rencana untuk menaikkan harga BBM sampai tidak lagi diperlukan subsidi BBM. Jika harga minyak dunia naik,

namun harga BBM tidak dinaikkan, maka subsidi BBM cukup besar dan ini adalah selisih biaya untuk menutupi perbedaan harga jual dan biaya produksinya. Karena BBM merupakan bahan dasar untuk melakukan kegiatan di segala sektor dan kehidupan, kenaikan harga BBM yang drastis akan menaikkan harga barang dan jasa termasuk kebutuhan sehari-hari rakyat banyak. Sebenarnya kelompok rumah tangga miskin yang paling menderita atas beban kenaikan harga BBM, karena di samping kebutuhan bahan bakar dan transportasi, kebutuhan-kebutuhan lain pasti naik pula, sedangkan penghasilan mereka relatif kecil (Suparmoko,2002).

### **8. Produk Domestik Bruto (PDB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tetapi pada dasarnya PDB mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis. Sedangkan menurut McEachern (2000), PDB artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli untuk diproses lagi dan dijual lagi (Barang dan jasa intermediate) tidak dimasukkan dalam PDB untuk menghindari masalah *double counting* atau penghitungan ganda, yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu kali.

Ada dua tipe PDB, yaitu :

1) PDB dengan harga berlaku atau PDB nominal, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.

2) PDB dengan harga tetap atau PDB riil, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain. Angka-angka PDB merupakan hasil perkalian jumlah produksi ( $Q$ ) dan harga ( $P$ ), kalau harga-harga naik dari tahun ke tahun karena inflasi, maka besarnya PDB akan naik pula, tetapi belum tentu kenaikan tersebut menunjukkan jumlah produksi (PDB riil). Mungkin kenaikan PDB hanya disebabkan oleh kenaikan harga saja, sedangkan volume produksi tetap atau merosot.

## **9. Hubungan Masing-Masing Variabel Terhadap Keseimbangan Primer**

### **9.1. Bunga dan Cicilan Utang Pemerintah**

Dalam penelitian PPE FE UGM, menerangkan bahwa aliran surplus primer merupakan fondasi utama bagi ketahanan fiskal pemerintah terhadap utang. Posisi utang pemerintah yang semakin meningkat dan memprihatinkan setiap tahunnya, menjadi masalah bagi pemerintah. Proporsi pembayaran utang yang begitu besar dalam APBN menjadi beban tersendiri bagi keuangan negara terlebih lagi efektivitas utang masih belum jelas.

Hussin Abdullah dkk (2012) dalam penelitiannya tentang *An Empirical Study On Fiscal Sustainability In Malaysia* menjelaskan bahwa Pencapaian makroekonomi dalam GDP berkesinambungan dengan surplus primer yang secara perlahan dan berangsur dalam mencapai kesinambungan (*sustainable*) memiliki kesinambungan fiskal yang baik dengan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan utang luar negeri dengan membatasi anggaran pengeluaran tidak melebihi penerimaan yang ada.

## **9.2. Inflasi**

Hutabarat (2005) menganalisis faktor determinan inflasi di Indonesia dan menyimpulkan determinan utama inflasi adalah ekspektasi inflasi yang terkait dengan pola pembentukan ekspektasi inflasi yang masih didominasi oleh inflasi masa lalu (ekspektasi adaptif). Perilaku ini menimbulkan persistensi inflasi karena riwayat inflasi Indonesia yang banyak dipicu oleh inflasi *cost- push* atau *supply shocks* yang signifikan dan sering terjadi, seperti gejolak harga minyak, kenaikan harga BBM, devaluasi dan fluktuasi berlebihan nilai tukar rupiah. Akibatnya pengeluaran negara yang melebihi penerimaan berarti anggaran negara itu ekspansif, artinya ada kecenderungan terhadap kenaikan harga-harga umum (inflasi).

Hal ini dikarenakan pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar utang pemerintah yang terlalu besar tidak tertutupi secara keseluruhan dan muncul utang baru akibat beban bunga yang terlalu besar. Maka akan berdampak dengan inflasi yang makin tinggi pula akibat tidak stabilnya perekonomian. Turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat ditimbulkan karena naiknya harga barang dan jasa. Hal

ini menjadikan permintaan menurun dan produksi pun ikut menurun. Akhirnya mengakibatkan PDB riil suatu negara pun turun karena output riil yang dihasilkan menjadi rendah. Sebab ini akan berdampak kepada pendapatan negara yang akan menurun juga dan memberikan konsekuensi keseimbangan primer menjadi defisit karena dengan pendapatan yang menurun pemerintah harus tetap menyediakan kebutuhan untuk rakyatnya. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan pembiayaan untuk mengatasi defisit dengan cara penambahan jumlah uang beredar. Metode penambahan uang dalam ekonomi akan meningkatkan permasalahan meningkatnya tingkat harga barang dan jasa, sehingga menyebabkan peningkatan inflasi (Samuelson, 2001 dalam Jaka Sriyana, 2007).

### **9.3. Nilai Tukar**

Nilai tukar rupiah merupakan salah satu variabel asumsi dasar ekonomi makro yang berhubungan dengan besaran APBN dan sangat menentukan banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk besarnya pembiayaan anggaran. Apabila nilai tukar rupiah menurun (terdepresiasi) terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak dan hal ini akan membebani APBN karena pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula atau dengan kata lain pembayaran utang luar negeri akan melonjak (Kuncoro, 2011). Sehingga, melonjaknya pembayaran utang luar negeri akan meningkatkan defisit keseimbangan primer. Kementerian Keuangan (2009) mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal APBN 2009. Hasilnya bahwa dengan

adanya perubahan beberapa asumsi ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, harga dan *lifting* minyak mentah Indonesia) yang secara signifikan berpengaruh terhadap besaran-besaran APBN, baik pada pendapatan negara maupun belanja negara.

#### **9.4. Harga Minyak Dunia**

Menurut Djunedi (2008) menjelaskan bahwa naiknya harga minyak dunia akibat krisis politik Timur Tengah, secara langsung berpengaruh terhadap harga minyak di Indonesia atau *Indonesian Crude Price (ICP)*. Dengan mengandalkan minyak impor inilah yang menjadi sebab ketergantungan Indonesia yang berlebihan terhadap negara eksportir minyak. Dengan demikian, ketika terjadi sedikit saja gejolak politik dan sosial ekonomi di negara eksportir yang berpengaruh pada fluktuasi harga minyak dunia, maka hal tersebut secara ekstrem berimplikasi terhadap stabilitas ICP dan juga surplus-defisit APBN Indonesia.

Pemerintah harus menyuntik anggaran yang tidak sedikit untuk menutupi kekurangan BBM dan kuota subsidi akan terus terkuras, atau melampaui ekspektasi penghematan pemerintah, maka APBN akan mengalami defisit. Dan hal ini secara serta-merta akan memicu guncangan ekonomi turunan di berbagai sektor yang berhubungan dengan BBM. Harga minyak yang terus meningkat akan semakin menambah besarnya defisit APBN (Djunedi, 2008).

Kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan pendapatan pemerintah yang berkaitan dengan minyak dan gas. Namun, kenaikan ini juga akan berdampak pada semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM. Ketika



kenaikan harga minyak dunia meningkatkan penerimaan anggaran belanja daerah, kenaikan harga minyak dunia ini merugikan anggaran belanja pemerintah pusat akibat membengkaknya pengeluaran subsidi BBM dan pengeluaran lain yang terkait. Pembengkakan subsidi ini pada akhirnya dapat memaksa pemerintah untuk memotong pos anggaran lainnya (*Center for Strategic and International Studies*, 2011).

### **9.5 Produk Domestik Bruto (PDB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, dan merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan keseimbangan tetapi pada dasarnya PDB mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis. PDB yang kian meningkat terjadi karena adanya kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik lagi. Artinya apabila PDB yang terus meningkat sepanjang tahun akan mempengaruhi keseimbangan primer tumbuh.

Turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat ditimbulkan karena naiknya harga barang dan jasa. Hal ini menjadikan permintaan menurun dan produksi pun ikut menurun. Akhirnya mengakibatkan PDB riil suatu negara pun turun karena output riil yang dihasilkan menjadi rendah. Sebab ini akan berdampak kepada pendapatan negara yang akan menurun juga dan memberikan konsekuensi keseimbangan primer menjadi defisit karena dengan pendapatan yang menurun

pemerintah harus tetap menyediakan kebutuhan untuk rakyatnya. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan pembiayaan untuk mengatasi defisit dengan cara penambahan jumlah uang beredar. Metode penambahan uang dalam ekonomi akan meningkatkan permasalahan meningkatnya tingkat harga barang dan jasa, sehingga menyebabkan peningkatan inflasi (Samuelson, 2001 dalam Jaka Sriyana, 2007).

## **8. Hubungan Seluruh Variabel**

Dari setiap hubungan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka penulis berasumsi jika harga minyak dunia meningkat setiap tahunnya, sedangkan kebutuhan akan konsumsi BBM di dalam negeri semakin bertambah dan harga minyak dunia mempengaruhi harga minyak dunia dalam negeri. Untuk mengatasi tingginya harga minyak dalam negeri pemerintah akan mengeluarkan subsidi pada BBM. Dalam APBN pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM selalu meningkat setiap tahunnya dikarenakan Indonesia selalu melakukan impor dalam hal ini sedangkan kegiatan ekspor dalam hal lain semakin berkurang akibatnya neraca berjalan berpengaruh.

Penerimaan negara yang selalu menurun dari sektor utama pajak ataupun lainnya dan pengeluaran pemerintah yang terlalu besar. Maka yang terjadi adalah defisit pada APBN, tidak hanya itu hal ini akan terjadi defisit pula pada keseimbangan primer. Karena untuk menutupi pengeluaran tersebut pemerintah harus menghutang ke negara lain. Sedangkan nilai tukar rupiah yang semakin menurun dan berubah setiap waktu dan suku bunga internasional yang berubah pula akan mempengaruhi pembayaran utang luar negeri. Utang luar negeri yang belum

tertutupi semua dalam tempo pembayaran yang telah ditentukan akan menimbulkan beban utang baru pada perekonomian. Dan hal ini akan berimbas pada APBN dan menyebabkan defisit fiskal dan defisit keseimbangan primer.

## **B. Tinjauan Empiris**

Adanya penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut membahas hanya sebagian dari variabel yang digunakan oleh penulis. Dan dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan judul penelitian.

1. Berdasarkan penelitian Gaffari Ramadhan dan Robert A Simanjuntak (2002), dalam jurnal “Dinamika Utang pemerintah Dan Kestinambungan Fiskal Di Indonesia periode 1980-2005: Suatu Uji perbandingan 3 pendekatan”. Analisis menggunakan model Hamilto dan Flavin menyatakan bahwa data utang pemerintah riil dalam keadaan stasioner baik pada kepercayaan 1%,5%, dan 10%. Dari hasil analisis menggunakan model Wilcox data menunjukan stasioner yang baik pada tingkat kepercayaan 5% dan 10%. Berdasarkan pengujian dengan 3 pendekatan menghasilkan , keadaan hutang pemerintah dan keseimbangan primer setelah masa krisis berada pada jalur yang sinambung.

Kemudian dalam penelitian ini pun memiliki kelemahan yaitu penggunaan metode yang terbilang sederhana dalam penulisan penelitian ini tentu

berimplikasi pada ketidakmampuannya dalam melihat aspek-aspek lain yang juga terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dengan, demikian dalam penelitian ini dapat saja terjadi bias pada hasil yang didapatkan. Selain memiliki kelemahan, penelitian ini juga memiliki kelebihan yaitu hasil dari perhitungan penelitian ini setidaknya dapat menggambarkan seberapa besar rasio penerimaan terhadap PDB yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah utang pemerintah dari tahun ke tahun dalam jangka menengah.

2. Penelitian dari Djamester A. Simarmata (2007), tentang *Fiscal Sustainability In Indonesia* mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kesinambungan fiskal di Indonesia dengan peningkatan hutang yang terus meningkat dan mengetahui tentang kompleksitas hutang luar negeri yang dapat mempengaruhi keberlanjutan hutang. Kemudian dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Sistem pengelolaan hutang yang lebih sesuai untuk mencapai keberlanjutan tinggi. Untuk negara berkembang IMF menentukan ambang batas yang sehat pada tingkat hutang adalah 40% dari PDB, sedang kelompok penulis *Reinhart et al* (2003) hanya memberi batas 15% dari PDB. Dua rasio ini terlanggar di Indonesia.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yaitu bentuk rumusan keberlanjutan fiskal dapat dirasa rumit dan dengan tuntutan data yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama. Tuntutan ini menimbulkan kesulitan analisa keberlanjutan fiskal atau hutang negara berkembang. Kelemahan selanjutnya adalah penelitian ini hanya terfokus pada dua variabel untuk menilai keberlanjutan fiskal yaitu tingkat hutang

pemerintah dan *government debt*, sehingga ada yang menyatakan sebagai keberlanjutan hutang pemerintah dan bukan keberlanjutan fiskal pemerintah. Kemudian kelebihan dari penelitian ini adalah dari penelitian ini didapatkan adanya faktor baru dalam pengelolaan hutang, terutama komponen hutang luar negeri suatu negara, yaitu struktur produksi dengan komponen produksi barang *non-tradables* dan *tradables goods*.

3. Kemudian penelitian untuk *fiscal sustainability* di Negara Malaysia yang dilakukan oleh Dr.Husein Abdullah *et al* (2012), yang berjudul “*An Emprirical Study On Fiscal In Malaysia*”. Mempunyai tujuan untuk mengetahui keadaan tingkat kesinambungan fiskal Malaysia. Dan di peroleh hasil bahwa Pencapaian makroekonomi dalam GDP di Malaysia *sustainable*. Surplus primer perlahan-lahan secara berangsur-angsur mencapai ketahanan (*sustainable*). Kelebihan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan 3 metode menunjukkan Malaysia memiliki tingkat kesinambungan fiskal yang baik, namun tetap perlu adanya campur tangan pemerintah yang lebih lagi agar keadaan tersebut tetap terjaga.
4. Penelitian selanjutnya oleh Harun Rosit (2010), yaitu “Hubungan kausalitas asumsi APBN terhadap APBN di Indonesia”. menunjukkan Hasil *variance decomposition* menunjukkan bahwa semua asumsi APBN yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional, dan produksi minyak Indonesia memberi kontribusi terhadap APBN, tetapi perkiraan *variance* yang paling memberi kontribusi APBN adalah harga minyak internasional dan nilai tukar. Sebaliknya, APBN juga mengkontribusi semua asumsi APBN yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi,

nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional, dan produksi minyak Indonesia.

5. Penelitian oleh Bakhtiar Efendi (2009), yang berjudul “Analisis defisit anggaran pemerintah dan investasi swasta di Indonesia”. menggunakan model penelitian model regresi simultan (Uji Simultan 2LS)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model defisit anggaran pemerintah dan investasi swasta di Indonesia dan Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa defisit anggaran pemerintah dan tingkat suku bunga kredit investasi mempunyai hubungan yang negatif dan menyebabkan crowding out terhadap investasi swasta di Indonesia selama tahun periode pengamatan. Sementara GDP Indonesia mempunyai hubungan yang positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia selama masa periode pengamatan.
6. Penelitian oleh Makhlani (2007), tentang Pola Pembangunan Ekonomi Dengan Pinjaman Luar Negeri. Mengapa Pinjaman Membengkak Dan Bagaimana Mengelolanya. Studi Kasus Pra Krisis Ekonomi (1970-1997). Menyatakan adanya perbedaan pola pada periode 1980-1990 PLN pemerintah lebih mendorong PLN swasta, tetapi pada periode 1988-1997, swasta lebih mendorong PLN pemerintah. PLN pemerintah pada tahun 1980-an lebih diarahkan ke proyek-proyek infrastruktur, SDM, teknologi, dan pengurangan kemiskinan sehingga mendorong ekspansi investasi swasta. Pembangunan ekonomi yang mengandalkan PLN telah mengikuti suatu pola tertentu. Kemudian kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terdapat pada periode penyehatan ekonomi, bantuan program

berperan besar, kemudian menurun sejalan dengan berjalannya perekonomian.

7. Berdasarkan penelitian Kementerian Keuangan (2009), tentang Analisis dalam mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal APBN 2009. Menunjukkan hasil bahwa dengan adanya perubahan beberapa asumsi ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, harga dan *lifting* minyak mentah Indonesia) yang secara signifikan berpengaruh terhadap besaran-besaran APBN, baik pada pendapatan negara maupun belanja negara. Hanya saja dalam penelitian ini kurang dijelaskan tentang perkiraan asumsi ekonomi makro yang nantinya dapat mendukung terhadap besaran-besaran kondisi APBN yang telah terealisasikan.
8. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2009) yaitu “Analisis Keberadaan Utang Indonesia dan Dampak Defisit Anggaran terhadap Keberlanjutan Fiskal”. Manurung menggunakan pendekatan likuiditas dan solvabilitas karena ia berpendapat bahwa likuiditas dan solvabilitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membayar utang beserta bunganya dengan menggunakan uang di luar utang dan obligasi pada saat perekonomian krisis. Rasio utang terhadap PDB kurang akurat dan penggunaan PDB sebagai indikator pendapatan pemerintah belum optimal. Pada pendekatan rasio likuiditas keseimbangan primer, hasil penelitian menunjukkan bahwa angka *debt service ratio* (DSR) yang terus meningkat dapat mengindikasikan bahwa fiskal Indonesia berada dalam kondisi *sustainable*. Meskipun tingkat solvabilitas fiskal cenderung

memburuk, dalam jangka panjang solvabilitas fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi aman sehingga fiskal Indonesia masih dapat dikatakan berkelanjutan. Sehingga untuk mengoptimalkan kebijakan fiskal Negara Indonesia tingkat pengembalian utang pemerintah sangat penting dalam memperoleh perhatian pemerintah yang salah satu indikator utamanya adalah keseimbangan primer Indonesia.

9. Penelitian oleh Hidayat (2014) tentang “Analisis Ketahanan Fiskal Indonesia”. Hidayat menyatakan bahwa tolok ukur dari kesehatan keuangan suatu negara terdapat tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama penerimaan pajak. Kedua yaitu defisit anggaran pemerintah, dan yang ketiga kondisi keseimbangan primer. Dalam penelitiannya Hidayat lebih menekankan pada analisis keseimbangan primer Indonesia karena nilai keseimbangan primer Indonesia yang semakin negatif dari tahun 2012 sampai sekarang. Menurutnya apabila keseimbangan primer negatif tidak dapat dikendalikan maka Indonesia berpotensi mengalami gagal bayar seperti yang terjadi di Italia dan Yunani. Adanya perkiraan terjadinya penurunan penerimaan pajak, maka keseimbangan primer negatif ini akan semakin besar dan utang pemerintah akan terus bertambah. Sehingga pemerintah harus berusaha dan mengupayakan efisiensi APBN dengan melakukan pemotongan anggaran belanja di beberapa kementerian/lembaga. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang ditentukan dengan menggunakan metode ilmiah secara aturan-aturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statistik. Kemudian perhitungan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

#### **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengambil ruang lingkup wilayah Indonesia. Dipilihnya ruang lingkup Indonesia dengan alasan keadaan keseimbangan primer pada APBN Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012 padahal sebelumnya selama 15 tahun terakhir tidak pernah mengalami defisit yang menyebabkan APBN pun mengalami defisit dengan terganggunya perekonomian karena utang pemerintah pun semakin meningkat. Dan variabel data yang digunakan adalah data Keseimbangan Primer (KP), Bunga dan Cicilan Utang Pemerintah (BC), Inflasi (INF), Nilai Tukar (NT), Harga Minyak Dunia (HM) dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang menggunakan data tahunan pada kurun waktu 1977-2014.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipakai dalam penelitian ini, jika dilihat dari sifatnya adalah Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dalam bentuk laporan tahunan yang telah disusun dan diterbitkan oleh pihak terkait yaitu dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *U.S Energy Information Administration* (EIA), Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik Nasional, dalam berbagai edisi serta berbagai sumber lainnya yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis, internet, buku dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

### **D. Batasan Variabel**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Keseimbangan Primer di Indonesia Periode 1977-2014 adalah Keseimbangan Primer (KP), Bunga dan Cicilan Utang Pemerintah (BC), Inflasi (INF), Nilai Tukar (NT), Harga Minyak Dunia (HM) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Batasan atau definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keseimbangan Primer adalah realisasi pendapatan negara dikurangi dengan realisasi belanja negara di luar pembayaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang pemerintah. Data diperoleh dari Nota Keuangan APBN Republik Indonesia yang dinyatakan dalam satuan rupiah selama periode 1977 sampai dengan 2014.

2. Bunga dan cicilan utang pemerintah meliputi pembayaran bunga dan cicilan utang dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan pembayaran bunga dan cicilan utang tetap didasarkan pada pemenuhan kewajiban pemerintah pada saat jatuh waktunya dan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Data diperoleh dari Nota Keuangan APBN Republik Indonesia yang dinyatakan dalam satuan rupiah selama periode 1977 sampai dengan 2014.
3. Inflasi yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Data inflasi yang digunakan adalah data inflasi berdasarkan Indeks harga konsumen Indonesia bulanan, dan satuannya dinyatakan dalam persen. Data diperoleh dari situs Bank Indonesia <http://www.bi.go.id> selama periode 20.
4. Nilai tukar merupakan harga dari satu mata uang dalam mata uang lain. Nilai tukar yang digunakan yaitu nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Nilai tukar yang digunakan yaitu nilai tukar transaksi tengah yaitu merupakan nilai tengah antara nilai tukar jual dan nilai tukar beli, yang diperoleh dari situs Bank Indonesia <http://www.bi.go.id>. Data yang digunakan yaitu data bulanan selama periode 1977 sampai dengan 2014.
5. Harga Minyak Dunia adalah harga yang digunakan dalam transaksi perdagangan minyak antar negara. Harga minyak dunia yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga minyak dunia yang terbentuk di pasar spot minyak Texas (West Texas Intermediate). Pemilihan harga minyak dunia WTI dijadikan standar harga minyak seluruh dunia karena kualitasnya paling baik. Data harga minyak dunia ini diperoleh dari website U.S *Energy Information Administration* (EIA) <http://www.eia.gov/> yang dinyatakan dalam satuan US\$ per barell selama periode 1977 sampai dengan 2014.

## 6. Produk Domestik Bruto

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Data Produk Domestik Bruto (PDB) ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional yang dinyatakan dalam satuan rupiah selama periode 1977 sampai dengan 2014.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis dari model koreksi kesalahan atau ECM (*Error Correction Model*) karena data yang tidak stasioner pada tingkat level, tetapi stasioner pada tingkat diferensiasi dan kedua variabel tersebut terkointegrasi. Metode yang digunakan untuk melihat hubungan dalam jangka pendek adalah dengan teori ekonomi serta dalam pemecahannya terhadap variabel *time series* yang tidak stasioner pada tingkat level dan regresi lancung. Regresi lancung adalah regresi yang kacau, dimana hasil regresi yang signifikan dari data yang tidak berhubungan. Agar kembali ke nilai keseimbangan di jangka panjang dengan syarat yaitu keberadaan hubungan kointegrasi di antara variabel-variabel penyusunnya. Dari analisis tersebut akan diperoleh persamaan regresi jangka pendek menuju keseimbangan jangka

panjang. Selanjutnya jika terdapat kecenderungan dalam jangka panjang pada variabel tersebut maka digunakan analisis dari uji regresi berganda menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai persamaan jangka panjang. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis regresi pula dapat digunakan untuk menjawab dari hipotesis yang ada yakni dapat diketahui faktor yang paling berpengaruh terhadap masalah defisit keseimbangan primer pada APBN Indonesia.

Sebelum dilakukan analisis hipotesis uji T dan uji F serta asumsi klasik, perlu dilakukan uji stasioner terhadap seluruh variabel untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut stasioner atau tidak. Setelah itu, model perlu dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui apakah suatu model tersebut menggambarkan hubungan jangka panjang antar variabel-variabel yang tidak stasioner dan menghasilkan variabel-variabel yang stasioer. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka model regresi atau model penelitian yang dihasilkan dari perhitungan regresi melalui bantuan Eviews, harus dilakukan evaluasi ekonometrik atau yang dikenal dengan uji asumsi klasik, agar model penelitian benar-benar menggambarkan fenomena kausal dan korelasional antar variabel yang diteliti.

## **F. Identifikasi Variabel**

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yakni variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, di mana dalam penelitian ini yaitu

Bunga dan Cicilan Utang Pemerintah (BC), Inflasi (INF), Nilai Tukar (NT), Harga Minyak Dunia (HM) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, di mana dalam penelitian ini Keseimbangan Primer (KP).

Tabel 2. Ringkasan Deskripsi Data Input

<b>Nama Data</b>	<b>Satuan Pengukuran</b>	<b>Periode Runtun Waktu</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Transformasi Data</b>
Keseimbangan Primer (KP)	Rp Milyar	1 tahunan	Kementerian Keuangan RI	KP
Bunga dan Cicilan Utang Pemerintah	Rp Milyar	1 tahunan	Nota Keuangan RI	BC
Tingkat Inflasi (INF)	Persen	1 tahunan	Bank Indonesia	INF
Nilai Tukar (Kurs)	Rp/USD	1 tahunan	Bank Indonesia	NT
Harga Minyak Dunia (HM)	US \$/bbl	1 tahunan	U.S Energy Information Administration	HM
Produk Domestik Bruto	Rp Milyar	1 tahunan	Badan Pusat Statistik Nasional	PDB

## G. Model Analisis

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan maka model yang digunakan pada data time series ini adalah model koreksi kesalahan atau ECM (*Error Correction Model*) dengan syarat utama bahwa data tidak stasioner di tingkat level, tetapi stasioner pada derajat integrasi dan variabelnya terkointegrasi. Model

yang digunakan untuk melakukan koreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang. Dan model regresi berganda menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Model yang digunakan adalah sebagai berikut :

Model umum dari regresi berganda yaitu :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t \quad (3.1)$$

Model umum *Error Correction Model* (ECM) yaitu :

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \Delta \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 EC_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3.2)$$

Model dalam penelitian, yaitu :

Model regresi berganda *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu :

$$KP_t = \beta_0 + \beta_1 BC_t + \beta_2 INF_t + \beta_3 NT_t + \beta_4 HM_t + \beta_5 PDB + \varepsilon_t \quad (3.3)$$

Model *Error Correction Model* (ECM) yaitu :

$$KP_t = \beta_0 + \beta_1 BC_t + \beta_2 INF_t + \beta_3 NT_t + \beta_4 HM_t + \beta_5 PDB + ECT_{t-1} \quad (3.4)$$

Dimana :

KP = Keseimbangan Primer

$\beta_0$  = bilangan konstanta

LNBC = Bunga & Cicilan Utang

$\beta_1 \dots \beta_5$  = koefisien regresi

INF = Inflasi

$ECT_{t-1}$  = *Error Correction Term*

NT = Nilai Tukar

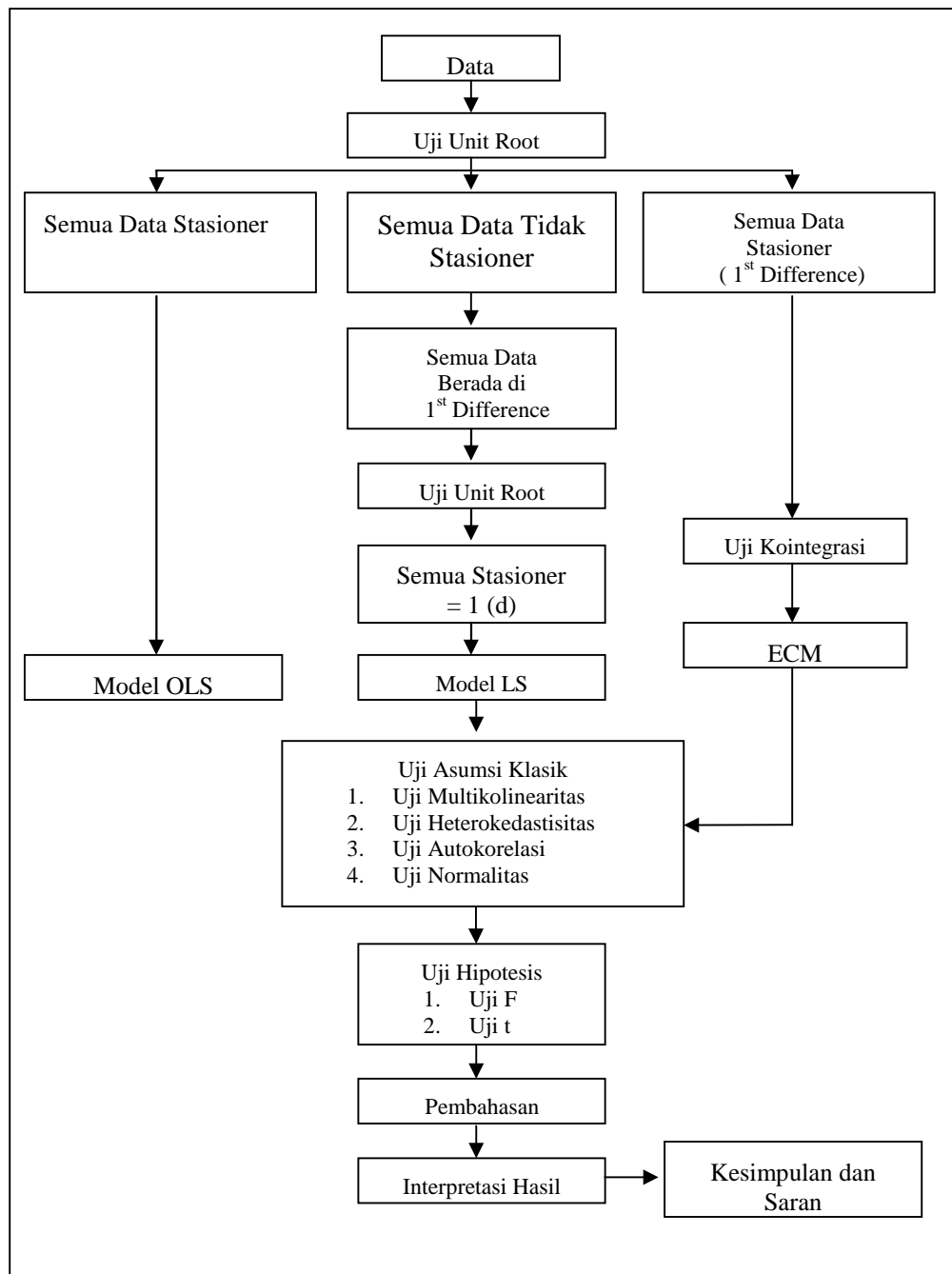
HM = Harga Minyak Dunia

PDB = Produk Domestik Bruto

## **H. Metode Analisis**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis asosiatif kuantitatif dengan menggunakan teori-teori dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini . Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penelitian ini, dalam menganalisis data menggunakan menggunakan software Microsoft Excel 2013 dan kemudian diolah menggunakan E-Views 6. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih dapat terlihat perbedaan pengaruh antara masing-masing variabel terhadap Keseimbangan Primer. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:





Sumber : Awaluddin (2003)

Gambar 2. Bagan Analisis Data Runtut Waktu

## 1. Uji Stasioneritas (Uji Akar Unit)

Sebelum melakukan regresi dengan menggunakan data runtut waktu, langkah awal yang dilakukan adalah uji stasioneritas. Setiap data runtut waktu merupakan suatu data yang dihasilkan dari hasil proses stokastik. Suatu data hasil proses stokastik dapat dikatakan stasioner jika memenuhi tiga syarat yaitu jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtut waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tersebut. Data runtut waktu yang stasioner rata-rata, varian dan kovariannya pada setiap lag akan sama dalam setiap waktu. Jika data tersebut tidak stasioner maka data tersebut tidak memenuhi syarat tersebut atau dengan kata lain data memiliki rata-rata dan variannya berubah-ubah sepanjang waktu. (Widarjono, 2006).

Uji stasioneritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data runtut waktu yang digunakan sudah stasioner atau belum. Regresi palsu (*spurious regression*) akan dihasilkan jika data tidak stasioner. Dalam penelitian pada dasarnya data runtut waktu sering mengalami ketidak stasioneran pada level *series*. Sehingga perlu dilakukannya differensiasi satu atau dua kali untuk menghasilkan data stasioner. Untuk mengetahui apakah data runtut waktu yang digunakan stasioner atau tidak stasioner, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan uji akar unit (*unit roots test*). Uji akar unit dilakukan dengan menggunakan metode *Augmented Dicky Fuller (ADF)* ,dengan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0$  :terdapat akar unit (data tidak stasioner)
- $H_1$  :tidak terdapat akar unit (data stasioner)

Hasil statistik dari hasil estimasi pada metode ADF akan dibandingkan dengan nilai kritis McKinnon pada titik kritis 1%, 5%, dan 10%. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai kritis McKinnon maka  $H_0$  diterima, artinya data terdapat akar unit atau data tidak stasioner. Jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai kritis McKinnon maka  $H_0$  ditolak, artinya data tidak terdapat akar unit atau data stasioner. Langkah pengujian stasioner data adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan uji terhadap level *series*. Jika hasil uji akar unit menolak hipotesis nol maka data tersebut mengandung *unit root*. Dan data tersebut telah stasioner pada tingkat level atau dengan kata lain terintegrasi pada  $I(0)$ . Jika semua variabel adalah stasioner maka estimasi terhadap model yang digunakan adalah regresi dengan OLS.
- b. Jika pengujian pada tingkat level tidak stasioner maka diperlukan pengujian kembali dengan melakukan uji akar unit pada *first difference* dari *series*. Jika hasil yang diperoleh menolak hipotesis adanya akar unit maka data runtut waktu sudah stasioner pada tingkat *first difference* atau semua *series* terintegrasi pada orde  $I(1)$ , sehingga estimasi dapat dilanjutkan dengan metode kointegrasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan diferensiasi lagi pada *series* sampai *series* menjadi stasioner atau terintegrasi pada ordo  $I(d)$ .

## **2. Uji Kointegrasi (Keseimbangan Jangka Panjang)**

Kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi kombinasi linier antara variabel tersebut dapat menjadi stasioner. Keadaan variabel yang tidak stasioner

menyebabkan kemungkinan adanya hubungan jangka panjang antara variabel dalam sistem ECM. Salah satu syarat agar tercapai keseimbangan jangka panjang adalah galat keseimbangan harus berfluktuasi di sekitar nol. Dengan kata lain, *error term* harus menjadi sebuah data runtut waktu yang stasioner. Tujuan adanya uji kointegrasi ini adalah agar seluruh variabel terintegrasi pada tingkat yang sama. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji kointegrasi (Enders, 2000). Uji kointegrasi pada penelitian ini hanya menggunakan metode *Johansen Cointegration Test*. Setelah melakukan uji regresi kointegrasi dan hasil model kointegrasi mempunyai hubungan atau keseimbangan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, mungkin terjadi ketidakseimbangan atau kedua-duanya tidak mencapai keseimbangan. Untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang disebut dengan *Error Correction Model* (ECM), yang diperkenalkan oleh Sargan dipopulerkan oleh Engle-Granger.

### **3. Uji Koreksi Kesalahan (ECM)**

Setelah melakukan uji kointegrasi dan hasil yang ditunjukkan oleh model menerangkan bahwa data mempunyai hubungan atau keseimbangan jangka panjang. Bagaimana dengan jangka pendeknya, sangat mungkin terjadi ketidakseimbangan atau keduanya tidak mencapai keseimbangan. Teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang disebut dengan *Error Correction Model* (ECM), yang dikenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Engle-Granger. Model ECM pada umumnya merupakan suatu konsep model ekonometris runtut waktu yang bertujuan untuk

menyeimbangkan kondisi jangka pendek dengan kondisi jangka keseimbangan jangka panjang melalui suatu proses penyesuaian.

Engle and Granger (1987) mengemukakan bahwa apabila diantara sejumlah peubah terdapat kointegrasi, maka diperoleh kondisi yang disebut *error correction representation* yang mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi terhadap variabel terikat tidak hanya dipengaruhi oleh variabel bebas tetapi juga dipengaruhi oleh keseimbangan dari hubungan kointegrasi. Ketidakseimbangan dari hubungan kointegrasi ini ditunjukkan oleh nilai *error-correction term*. Selain itu dalam ekonometrika ECM berguna dalam mengatasi masalah data time series yang tidak stasioner dan masalah *spurious regression*.

Analisis dengan menggunakan ECM melalui 3 langkah analisis data yaitu (1) uji stasioner data, (2) uji kointegrasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel X dengan Y, dan (3) menyusun *Error-Correction Model* (Gujarati, 2006).

Persamaan *Error Correction Model* (ECM) yaitu sebagai berikut:

$$KP_t = \beta_0 + \beta_1 LNBC_t + \beta_2 INF_t + \beta_3 LNNT_t + \beta_4 LNHM_t + ECT_{t-1} \quad (3.5)$$

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Menurut Gujarati (2006) bahwa beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk suatu hasil estimasi agar dapat dikatakan baik dan efisien yaitu :

- Model regresi adalah linear.
- Tidak ada multikolinearitas
- *Error term* harus terdistribusi normal atau stokastik
- Homokedastisitas atau varians dari variabel pengganggu adalah konstan.
- Jumlah data harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah parameter yang akan diestimasi.
- Residual variabel pengganggu mempunyai rata-rata nol.
- Tidak ada autokorelasi antara variabel pengganggu.
- Kovarian antara variabel pengganggu dan variabel independen ( $X_1$ ) adalah nol.

Berdasarkan keadaan tersebut di dalam ilmu ekonometrika, agar suatu model dikatakan baik dan efisien maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut :

##### 4.1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana terjadi linear yang sempurna di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel dependent dalam model regresi atau untuk menguji ada tidaknya hubungan yang sempurna

atau tidak sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan. Menurut Gujarati (2006) beberapa cara untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh multikolinearitas dalam penelitian ini yaitu :

- $R^2$  relatif tinggi (0,70 – 1,00) tetapi hanya sebagian kecil atau bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan menurut  $t$ -test, maka diduga terdapat multikolinearitas.
- Koefisien determinasi individual ( $r^2$ ) relatif tinggi daripada koefisien determinasi serentak ( $R^2$ ), maka cenderung terdapat multikolinearitas
- Mengamati nilai inflation factor (VIF) pada model regresi, jika  $VIF \geq 10$  maka terjadi multikolinearitas.

Pada penelitian ini dalam mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan mengamati nilai varians inflation factor (VIF) pada model regresi. Suatu data dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas jika nilai VIF antar variabel independen lebih kecil dari 10.

#### **4.2. Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesamaan varian (homokedastisitas) yaitu kesalahan ( $e$ ) tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Karena heterokedastisitas terjadi ketika varian dari residual pengamatan satu ke residual ke pengamatan yang lain tetap. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat melalui

Uji *White* (Gujarati, 2006). Dalam pengujian heterkedastisitas uji *White* merumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat heterokedastisitas

Ha : Terdapat heterokedastisitas

Kriteria pengujian heterkedastiitas adalah :

- Ho ditolak, jika nilai Obs\*R square ( $\lambda^2$  hitung)  $> \lambda^2$  tabel. Maka terdapat masalah heterkedastisitas.
- Ho diterima, jika nilai Obs\*R square ( $\lambda^2$  hitung)  $< \lambda^2$  tabel. Maka tidak ada masalah heterokedastisitas.

Selain itu dapat dilihat juga apabila nilai probabilitas Obs\*R square lebih besar dari  $\alpha$  (5%) maka data bersifat heteroskedastisitas. Sebaliknya bila probabilitas Obs\*R square lebih kecil dari  $\alpha$  (5%) maka data bersifat tidak heteroskedastisitas.

### 4.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antar anggota sampel yang tersusun berdasarkan waktu saling berkorelasi. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data runtut waktu, hal ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya atau pengganggu suatu periode berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara data dalam variabel pengamatan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat digunakan metode *Breusch-Godfrey* dan sering dikenal dengan nama metode *Lagrange Multiplier* (LM). Metode ini merupakan pengembangan dari metode Durbin-Watson.

Hipotesis yang digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi yaitu :



- 1)  $H_0$  ditolak, jika Obs\*R-squared ( $\chi^2_{hitung}$ )  $>$  ( $\chi^2$  tabel), atau probabilitasnya  $<$   $\alpha = 0.05$ . Ini menunjukkan adanya masalah otokorelasi dalam model.
- 2)  $H_0$  diterima, jika Obs\*R-squared ( $\chi^2_{hitung}$ )  $<$  ( $\chi^2$  tabel), atau probabilitasnya  $>$   $\alpha = 0.05$ . Ini menunjukkan tidak adanya masalah otokorelasi dalam model.

#### 4.4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sudah menyebar secara normal dan mengetahui kenormalan *error term* dari variabel bebas maupun terikat. Jika data tidak terdistribusi normal maka hasilnya tetap tidak bias, namun tidak lagi efisien. Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini dapat menggunakan metode *Jarque-Bera Test (J-B Test)*. Dalam metode ini uji statistik dari J-B menggunakan perhitungan *skewness* dan kurtosis. Jika suatu variabel didistribusikan secara normal maka koefisien  $S=0$  dan  $K=3$ . Sebab itu, residual akan terdistribusi secara normal apabila nilai statistik J-B sama dengan nol. Dan nilai J-B ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan derajat kebebasan (df). Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0$  : Data berdistribusi normal

$H_a$  : Data tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian heterokedastisitas adalah :

- $H_0$  ditolak, jika nilai probabilitas  $< \alpha$  5%. Artinya bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B tidak sama dengan nol.
- $H_0$  diterima, jika nilai probabilitas  $> \alpha$  5%. Artinya bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B mendekati nol.

## 5. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Uji Hipotesis dibagi menjadi beberapa pengujian diantaranya yaitu uji t statistik dan uji F.

### 5.1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t-stat dilakukan untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Dalam uji ini, suatu koefisien disebut signifikan secara statistik jika t-stat berada pada daerah kritis yang dibatasi oleh nilai t-tabel sesuai dengan tingkat signifikansi tertentu. Tahap yang dilakukan dalam Uji t adalah sebagai berikut :

1) Menentukan  $H_0$  dan  $H_a$ .

Jika Hipotesis positif, maka :

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_a : \beta_1 > 0$$

Jika hipotesis negatif, maka :

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

- 2) Menentukan tingkat keyakinan dan daerah kritis ( $D_f = n - k - 1$ )
- 3) Menentukan nilai t tabel kemudian membandingkan nilai t tabel dan nilai t statistik.

Kriteria dalam uji t yaitu :

- $H_0$  diterima, jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  ;  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  Artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat
- $H_0$  ditolak, jika  $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$  ;  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ . Artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

## 5.2. Uji F (Uji Keseluruhan)

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan atau tidak signifikannya terhadap variabel dependen. Dengan derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%, apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi F dengan cara membandingkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan F-tabelnya. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut :

- 1)  $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 = 0$   $H_0$  diterima (Prob F-statistik signifikan pada  $\alpha=5\%$  atau F statistik  $< F$  tabel), artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
- 2)  $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 \neq 0$   $H_a$  ditolak (Prob F-statistik tidak signifikan pada  $\alpha = 5\%$  atau F statistik  $< F$  tabel), artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi secara ekonomi, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran bunga dan cicilan pokok utang pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer. Temuan ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Pengaruh ini terjadi pada jangka pendek dimana pembayaran bunga dan cicilan pokok utang adalah bagian dari belanja rutin pemerintah yang selalu ada dalam setiap periode anggaran APBN dibuat. Sehingga besarnya sangat mempengaruhi kondisi keseimbangan primer, karena pembayaran bunga dan cicilan pokok utang menggunakan anggaran selisih yang dihasilkan antara pendapatan dan belanja negara yaitu keseimbangan primer.
- b. Dalam jangka pendek hasil pengujian menyatakan inflasi tidak signifikan terhadap keseimbangan primer. Dikarenakan Inflasi dikendalikan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia atau otoritas moneter, pengendalian inflasi ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena perlu adanya pengawasan langsung yang membutuhkan waktu lama dan biaya. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia atas inflasi sangat terbatas, karena inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, Bank

Indonesia sebagai jasa otoritas moneter selalu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan perekonomian, khususnya terhadap kemungkinan tekanan inflasi. Selanjutnya respon kebijakan moneter didasarkan kepada hasil penyesuaian tersebut.

- c. Nilai tukar berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer, temuan ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Pengaruh ini terjadi pada jangka pendek dimana nilai tukar sangat mempengaruhi nilai dari keseimbangan primer. Anggaran keseimbangan primer yang perhitungannya digunakan untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang, sedangkan bunga dan cicilan utang secara tidak langsung sangat dipengaruhi oleh nilai tukar. Apabila nilai tukar terapresiasi maka akan menambah kemampuan keseimbangan primer dalam membiayai defisit anggaran yang terutama disebabkan oleh utang dan sebaliknya apabila nilai tukar terdepresiasi maka akan mengurangi kemampuan dari keseimbangan primer.
- d. Harga minyak dunia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keseimbangan primer, temuan ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Pengaruh ini terjadi pada jangka pendek dimana harga minyak dunia sangat menentukan jumlah realisasi anggaran subsidi BBM dalam APBN. Hal ini akan berpengaruh terhadap besarnya pemberian subsidi BBM dan berdampak pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang semakin membesar tanpa diimbangi penerimaan negara yang tinggi akan mengakibatkan

keseimbangan primer menurun sepanjang tahun dan mengalami defisit yang berkepanjangan.

- e. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap keseimbangan primer, temuan ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Pengaruh ini terjadi pada jangka pendek dimana PDB merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi pendapatan negara. Apabila PDB dalam kondisi yang tumbuh maka keseimbangan primer pun akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya apabila PDB mengalami penurunan maka keseimbangan primer akan cenderung mengalami penurunan.
- f. Dalam model yang dibangun pada penelitian ini terlihat bahwa secara bersama-sama variabel pembayaran bunga dan cicilan pokok utang, nilai tukar, harga minyak dunia, dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap keseimbangan primer Indonesia.
- g. *Primary balance* merupakan salah satu indikator utama bagi kestabilan kebijakan fiskal dalam menghadapi masalah defisit anggaran, dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa *primary balance* dipengaruhi oleh variabel-variabel indikatornya yaitu pembayaran bunga dan cicilan utang pemerintah, inflasi, nilai tukar, harga minyak dunia dan Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit keseimbangan primer dapat diperbaiki melalui kestabilan kondisi variabel-variabel makro ekonomi yang mempengaruhinya.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

- a) Pemerintah harus dapat mengontrol posisi keseimbangan primer, semakin positif (surplus) akan semakin baik lagi ketahanan anggaran dikarenakan beban pemerintah terutama yang berasal dari utang dapat ditutupi oleh penerimaan negara dan bukan berasal dari utang baru.
- b) Pemerintah harus memperhatikan utang yang digunakan baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri karena utang ada kalanya tidak selalu memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi, begitu juga sebaliknya utang dapat memberikan pengaruh negatif jika nilainya melebihi batas maksimal utang sebesar 71%.
- c) Pemerintah dan otoritas moneter harus lebih berusaha dalam melakukan kontrol terhadap nilai tukar agar selalu dalam kondisi yang stabil dan tidak mengalami depresiasi nilai tukar rupiah.
- d) Pemerintah dan otoritas moneter harus dapat menyesuaikan laju inflasi dalam kondisi yang normal agar tidak menimbulkan kejolak yang cukup besar terhadap perekonomian.
- e) Pemerintah harus dapat melakukan penghematan terhadap belanja BBM, dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) agar mampu mendorong anggaran negara menuju kondisi yang surplus.
- f) Implikasi ekonomi dan kebijakan dari setiap variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap keseimbangan primer dapat menjadi perhatian utama pemerintah, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dari kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan.



## **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a) Keterbatasan dalam periode waktu penelitian, pengolahan data, sehingga hasil pengujian pengaruh beberapa variabel bebas terhadap keseimbangan primer berbeda dari teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka untuk peneliti selanjutnya perlu untuk menambahkan rentang waktu penelitian yang lebih panjang.
- b) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat berpengaruh pada keseimbangan primer. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain agar hasil yang diperoleh semakin baik. Seperti variabel suku bunga libor, neraca pembayaran Indonesia, stok utang dalam negeri, stok utang luar negeri dan rasio utang pemerintah terhadap PDB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Husein., Muszafarsah Mohd Mustafa., dan Dr.Jauhari Dahlan .2012. "An Emprirical Study On Fiscal In Malaysia" *Internasional Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol 2, No. 1. ISSN : 2222-6990.
- Badan Kebijakan Fiskal Dan Japan International Cooperation Agency. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- Bank Dunia. 2002. Indonesia : *Managing Government Debt and Its Risks. The World Bank East Asia and Pasific Region*. The World Bank. Washington, DC. USA.
- Bank Indonesia. 2012. *Laporan Perekonomian Indonesia. Menjaga Keseimbangan Mendukung Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan*. Jakarta.
- Basri, Zainal. Yuswan Subri Mulyadi, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Balnchard, Oliver J. 1990. Suggestion for a New Set of Fiscal Indicators. *OECD Working Papper No. 79*. Paris. Organization for Economics Cooperation and Development
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Edisi Dua Puluh Satu. BPFE. Yogyakarta.
- Boediono. 2004. "Kebijakan Fiskal : Sekarang dan Selanjutnya," dalam Heru Subiyanto dan Singgih Riphah". *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, Kompas*.
- Buiter, W.H. 2003. *Fiscal Sustainability*. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
- Burnside, Craig. 2005. *Fiscal Sustainability in Theory and Practice: A Handbook*. Washington, D. C.: World Bank.

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berbagai edisi. *Perkembangan Utang Negara Indonesia: Pinjaman Luar Negeri dan Surat Berharga*, diakses pada 10 Maret dari <http://www.djpu.kemenkeu.go.id/index.php/page/>
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Perkembangan Utang Negara (Pinjaman dan Surat Berharga Negara)*. Dirjen PUKKRI. Jakarta
- Djunedi, Praptono. 2008. Naiknya Harga Minyak dan Antisipatif APBN. Peneliti Badan Kebijakan Fiskal. *Majalah Warta Anggaran No.9*.
- Efendi, Bakhtiar .2009. Defisit Anggaran Pemerintah dan Infestasi Swasta di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi USU*. Medan.
- Gujarati, Damodar, dan Sumarno Zain. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Hidayah, Mina. 2012. Analisis Keberlanjutan Fiskal dan Utang Pemerintah Terhadap Keseimbangan Primer di Indonesia, 2000.1-2014.4: Pendekatan *Error Correction Model (ECM)*. Jogjakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hidayat, Asrul. 2014. Analisis Ketahanan Fiskal Indonesia. Pemerhati Kebijakan Perpajakan, Bisnis Indonesia. *Vol 5 No.2* (Nov 2014)
- Hutabarat, Akhis R. 2005. Determinan Inflasi di Indonesia. *Occasional Paper No.6/2005*. Bank Indonesia
- Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan RAPBN*, beberapa tahun penerbitan. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). Diakses Januari 2015.
- Koo, Chung Mo. 2008. "Fiscal Sustainability and Its Implication for Fiscal Policy in Korea" *The Journal of The Korean Economy*. *Vol 9 No.3 (Des 2008)*, 497-521.
- Kuncoro, Haryo. 2011. Ketangguhan APBN Dalam Pembayaran Utang. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Laporan Bank Indonesia. 1998-2014. [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id). Diakses Januari 2015.
- Lestari, Sri Rahayu. 2011. Outlook Penyerapan Belanja Kementrian/Lembaga. *Jurnal Keuangan Publik*. Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal.
- Makhlani, 2007. Pola-Pola Pembangunan Ekonomi Dengan Pinjaman Luar Negeri. *BAPEKKI Working Papper, December 2003*. Pusat Kerjasama Internasional BAPEKKI Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Mankiw, N Gregory. 2009. *Makroekonomi*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Manurung, Mandala. 2009. "Analisis Keberadaan Utang Indonesia dan Dampak Defisit Anggaran terhadap Keberlanjutan Fiskal". *Jurnal Kebijakan Ekonomi. Vol 2 No. 1. Hal 25-58*

Nota Keuangan APBN Indonesia Tahun 1977-2014

Ramadhan, Gaffari .Robert A Simanjuntak .2007. "Dinamika Utang pemerintah Dan Kestinambungan Fiskal Di Indonesia priode 1980-2005: Suatu Uji perbandingan 3 pendekatan". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VIII No. 01.*

Rosit, Harun. 2010. Analisis Kausalitas Asumsi APBN terhadap APBN di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan USU. Medan.*

Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. 2001. *Makro Ekonomi, Edisi Keempat Belas.* Jakarta. Erlangga.

Santoso, Bagus. 2004. Studi Kestinambungan Fiskal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi. Vol 1 No. 3. Hal 235-258*

Sargent, Thomas J. 2011. Ability to Borrow Today Depends on Expectations About Future Revenues. *Article of United States Then, Europe Now.*

Sawitri, Hendrin H. 2006. Dampak Defisit Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen 2(1).* Maret 1-10

Simamarta, Djamester A. 2007. "Fiscal Sustainability In Indonesia", *Indonesia Economic Journal, ISSN 0854-1507.*

Simanjuntak, Payaman. 2002. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya.* Jakarta. FEUI

Suparmoko, M. 2002. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta. BPFE.

Suharsih, S. (2013). "Fluktuasi Harga Minyak Dunia dan Pencapaian Sustainabilitas Fiskal Indonesia". *KINERJA Vol. 17. No. 1. Hal. 28-44*

Suriadi, O. L. (2013). "Pembiayaan Defisit dengan Utang dan Ketahanan Fiskal di Indonesia". *Journal The WINNERS, Vol. 14 No. 2, Hal. 127-137*

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews,* Edisi 4, Penerbit UPP STIM YKPN, Jakarta.